

**IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM TRANSAKSI
PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL
PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN
SWITCHING ASING**

**(Studi Kasus Tentang Integrasi *YourAllPayment* Bank BNI dengan
Liquidpay Singapore)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YASINTA DINDA ASMARANI PUTRI

NIM: 155010100111122



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM TRANSAKSI
PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL
PEMBAYARAN YANG TEHUBUNG DENGAN
SWITCHING ASING
(Studi Kasus Tentang Integrasi *YourAllPayment* Bank BNI dengan
Liquidpay Singapore)**

Oleh:

**YASINTA DINDA ASMARANI PUTRI
NIM: 155010100111122**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP. 198305022008121003

Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.
NIK. 201304 830723 2 000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP. 19760815 199903 1 003

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul **IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN QR CODE DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN SWITCHING ASING**(Studi Kasus tentang Integrasi Your All Payment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switchingasing*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso , S.H., LL.M selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, saran, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

7. Kedua orangtua tercinta, Ibu Widarti dan Bapak Puryanto yang telah memberikan semangat, doa, serta kasih sayangnya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini
8. Kakak tersayang, Deska Adiyana Pratama Putra dan Dwi Rama Perasada Putra yang telah memberikan semangat dan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat penulis, Jannah, Rosifatul, Hafsa, Firda, dan Yuli yang selalu menemani, memotivasi, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini
10. Sahabat-sahabat penulis, Anggin, Andrias, Dinda, Iga, Irena, Merri, Tamara, dan Icing yang telah mendukung, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
11. Sahabat-sahabat KKN Kelompok 16 Dusun Pabrian Desa Jambesari yang telah memberikan motivasi kepada penulis
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan segala keterbatasan dan kemampuan dari penulis. Namun, penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Diagram	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	ix
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Bank	16
1. Definisi Bank	16
2. Fungsi Perbankan	17
B. Tinjauan Umum tentang Bank Indonesia	17
1. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia	18
2. Kewenangan Bank Indonesia	19
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembayaran	20
1. Jenis Alat Pembayaran	22
D. Tinjauan Umum tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	23
E. Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik	24
F. Tinjauan Umum tentang Uang Elektronik (<i>E-money</i>)	25
1. Manfaat Uang Elektronik	27
G. Tinjauan Umum tentang QR Code	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	36
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	36
F. Definisi Konseptual	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Implikasi Yuridis Penggunaan <i>QR Code</i> dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank dengan Menggunakan Kanal Pembayaran yang Terhubung dengan <i>Switching</i> Asing .	39
1. Analisis Pengaturan Tentang Penggunaan <i>QR Code</i> dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank dengan Menggunakan Kanal Pembayaran yang Terhubung dengan <i>Switching</i> Asing dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	39
2. Implikasi Yuridis Penggunaan <i>QR Code</i> dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank dengan Menggunakan Kanal Pembayaran yang Terhubung dengan <i>Switching</i> Asing	70
B. Perbandingan Pengaturan Penggunaan <i>QR Code</i> Antara Indonesia dan Singapore .	80
1. Indonesia	80
2. Singapura	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel	Penelitian	Terdahulu	10
.....				
Tabel 1.2	Analisis Pengaturan Penggunaan <i>QRCode</i> Dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank.....			53



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Perkiraan Penggunaan <i>MobilePayment</i> Tahun 2016-2020.....	48
Diagram 1.2	<i>Mobile Payment</i> di Indonesia	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 4. Pernyataan Keaslian Skripsi



RINGKASAN

Yasinta Dinda Asmarani Putri, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2019, IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN *SWITCHING* ASING (Studi Kasus tentang Integrasi *YourAllPayment* Bank BNI dengan Liquidpay Singapore), Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya berbagai inovasi dalam bidang pembayaran salah satunya yaitu uang elektronik berbasis *QR Code*. Penggunaan uang elektronik berbasis *QR Code* telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, bahwabagi uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN. Berdasarkan Pasal tersebut terdapat kata hanya dapat yang berarti tidak dapat digantikan. Artinya ketentuan tersebut bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran asing. Apabila ketentuan yang bersifat memaksa tidak terpenuhi maka seharusnya akan menimbulkan sanksi hukum. Namun, terkait dengan pemberian sanksi hukum atas pelanggaran Pasal 39 ayat (1) belum diatur dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh Bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing?.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: implikasi yuridis penggunaan uang elektronik berbasis *QR Code* dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing terhadap syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal. Sehingga pada perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum atau perjanjian tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Sehingga bagi uang elektronik asing yang ditransaksikan di Indonesia dengan tidak terhubung GPN apabila terjadi suatu hal yang dapat merugikan para pihak menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Bagi pihak asing yang melakukan kerjasama dengan Bank dalam negeri dengan tidak terhubung GPN dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 42 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda; dan/atau

- c. Pengehentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG)



SUMMARY

Yasinta Dinda Asmarani Putri, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2019, IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN QR CODE DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN SWITCHING ASING (Studi Kasus tentang Integrasi Your All Payment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore), Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.

Technology development has resulted in the emergence of various innovations in the field of payment, one of which is QR Code-based electronic money. The use of QR Code-based electronic money is regulated in Article 39 paragraph (1) PBI Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money, for electronic money issued outside of Indonesia can only be transacted in Indonesia using payment channels connected to GPN. Based on the Article there are only words that can be meaningful which cannot be replaced. This means that these provisions are compulsive and must be carried out by providers of foreign payment system services. If forced provisions are not fulfilled, legal sanctions should arise. However, related to the granting of legal sanctions for violations of Article 39 paragraph (1) has not been regulated in PBI Number 20/6 / PBI / 2018 concerning Electronic Money.

Based on the background above, the legal issues raised in this study are what are the juridical implications of using the QR Code in payment transactions by banks using payment channels that are connected with foreign switching ?.

To answer the above problems, this normative legal research uses a legislative approach, a case approach, an analytical approach, and a comparative approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through library and internet studies. Legal materials that have been obtained are analyzed using techniques of grammatical interpretation and systematic interpretation so that they can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated.

The results showed that: the juridical implications of using QR Code-based electronic money using payment channels connected with foreign switching to the legal terms of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code did not meet the objective requirements of halal causality. So that the agreement will result in null and void or the agreement is not protected by law. So that for foreign electronic money that is transacted in Indonesia with no connection to GPN if something happens that can harm the parties, it has no legal force. For foreign parties who collaborate with domestic banks with no connection to the GPN subject to administrative sanctions based on Article 42 PBI Number 19/8/PBI/2017 concerning the National Payment Gate (GPN) in the form of:

- a. Written warning*
- b. Fine; and / or*
- c. Temporary or permanent termination of connectivity with GPN (NPG)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian nasional. Efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kelancaran mekanisme dalam sistem pembayaran.¹ Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi terciptanya sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, inklusif dan inovatif.² Saat ini sistem pembayaran mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi diakui telah memberikan alternatif alat pembayaran non tunai dan mekanisme perpindahan dana yang cukup efisien bagi para pelaku ekonomi.³ Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk menggunakan alat pembayaran non tunai dalam bertransaksi. Hal ini yang mendorong munculnya berbagai inovasi dalam bidang sistem pembayaran dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Alat transaksi atau alat pembayaran yang dulunya hanya berupa uang kartal yaitu dalam bentuk uang kertas dan uang logam kini telah berkembang dalam bentuk transaksi elektronik atau biasa disebut pembayaran non tunai.

¹Bank Indonesia, **Pengantar Sistem Pembayaran**, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

²Bank Indonesia, 2018, **Bab 9 Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, Laporan Perekonomian Indonesia, hlm. 160

³Bank Indonesia, **Pengantar Sistem Pembayaran**, *Op. Cit.*

Definisi transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi elektronik dalam hal ini merupakan kegiatan pembayaran atau transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti IC (*Integrated Circuit*) dan jaringan komunikasi.⁴ Alat pembayaran elektronik atau non tunai awalnya hanya dikenal dalam bentuk kartu debit (*debit card*), kartu kredit (*credit card*), kartu ATM, dan kartu penyimpanan dana (*stored value card*).⁵ Kemudian semakin berkembang, sehingga pembayaran elektronik yang sudah ada saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, kartu debit atau ATM.⁶ Walaupun menggunakan teknologi yang berbeda-beda, tetapi seluruh transaksi tersebut terhubung dan dibebankan langsung kepada rekening nasabah yang menggunakan.⁷ Dengan tersedianya berbagai jenis alat pembayaran tersebut memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih alat pembayaran yang sesuai dengan keperluan masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank

⁴Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial**, Jurnal Ekonomi Universitas Udayana

⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar

⁶Bank Indonesia, **Paper Kajian Mengenai E-Money**, Bank Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 2

⁷ Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Pembayaran Nasional,
<https://www.bi.go.id/en/sistempembayaran/edukasi/Documents/7bb2ae019b024029b37c34b720412a49PengantarInstrumenPembayaran.pdf> (diakses pada 23 Januari 2019)

Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu dengan cara menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan tentang keamanan dan efisien bagi penggunaannya.⁸

Pada akhir tahun 2017 Bank Indonesia memperkenalkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yaitu sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.⁹ Pengertian mengenai GPN telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).¹⁰

“Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *service* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara *online*.”¹¹

Sebelum adanya GPN, penggunaan instrumen pembayaran non tunai di Indonesia terhubung dengan sistem pembayaran asing yang menggunakan *switching* seperti Visa, MasterCard, JCB, dan UnionPay. Transaksi pembayaran yang dilakukan di Indonesia dengan terhubung lembaga *switching* asing memiliki beberapa kekurangan, yaitu tiap melakukan transaksi melalui kartu berlogo *switching* asing tersebut pemrosesannya

⁸Muhammad Sofyan Abidin, 2015, **Dampak Kebijakan E-money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru**, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/13212/12129> (diakses pada 25 Oktober 2018)

⁹Standard Chartered Bank, **Gerbang Pembayaran Nasional Aman, Andal, dan Terpercaya**, <https://www.sc.com/global/av/id-impo-info-2002018.pdf> (diakses pada 25 Oktober 2018)

¹⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN

¹¹Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional

dilakukan di luar negeri sehingga biaya yang dikeluarkan tiap transaksi cukup mahal serta kurangnya perlindungan data privasi nasabah karena pemrosesannya tidak dilakukan di dalam negeri melainkan diproses oleh lembaga *switching* asing sehingga rentan terjadi *hacking* dan *skimming*. Dengan adanya GPN semua transaksi di Indonesia seperti tarik tunai di ATM bank lain atau transfer antar bank menjadi lebih murah karena seluruh pemrosesannya dilakukan di dalam negeri. Karena pemrosesannya dilakukan di dalam negeri itu sehingga pihak bank dapat langsung mengelola sendiri proses transaksinya maka perlindungan data privasi nasabah menjadi lebih terjamin. Saat ini GPN hanya berlaku untuk kartu debit dan uang elektronik *chip-based*, sedangkan untuk kartu kredit masih menggunakan sistem pembayaran milik asing karena masyarakat yang berpergian ke luar negeri cenderung melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit.¹² Transaksi kartu kredit di Indonesia saat ini masih didominasi oleh prinsipal kartu kredit asing, yaitu American Express, JCB, Mastercard, Visa Card, dan China Union Pay.¹³

Diberlakukannya GPN diharapkan dapat meningkatkan keuangan inklusif dan pengembangan perdagangan nasional berbasis elektronik (*e-commerce*). Hal ini sesuai dengan program Bank Indonesia yang sedang mengembangkan program keuangan inklusif, yaitu suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti

¹²Tommy Kurnia, 2018, **Menukar Kartu Debit dengan yang Berlogo GPN Hukumnya Wajib?**, <http://liputan6.com> (diakses pada 15 November 2018)

¹³Remon Samora, 2017, **Babak Baru Sistem Pembayaran GPN**, <https://m.kontan.co.id> (diakses pada 15 November 2018)

sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.¹⁴Program ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran sehingga akan terbentuk *cashless society*. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan uang tunai yang membutuhkan biaya cukup besar, baik dalam biaya produksi maupun pada biaya transaksi.

Program *cashless society* sebenarnya telah banyak diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah melalui uang elektronik. Uang elektronik sebagai alternatif pembayaran non tunai tidak hanya dalam bentuk kartu tetapi juga dalam bentuk lainnya yang tersimpan dalam *smartphone*.¹⁵Penerbitan uang elektronik dapat dilakukan baik oleh lembaga perbankan maupun oleh lembaga non bank, seperti perusahaan keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan transportasi publik.¹⁶Penyelenggaraan kegiatan uang elektronik baik oleh lembaga perbankan maupun non perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI tentang Uang Elektronik) yaitu:

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

¹⁴Bank Indonesia, 2018, **Program Keuangan Inklusi**, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusiif/program.Contents/default.aspx> (diakses pada 07 Oktober 2018)

¹⁵Rachmadi Usman, 2017, **Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran**, *Yuridika*, Volume 32 Nomor 1, hlm. 136

¹⁶*Ibid*,

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut ketentuan tersebut, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant* tertentu yang telah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik. Penerbitan uang elektronik atas dasar nilai uang disetor yang tersimpan dalam media *server* atau *chip*. Selama ini masyarakat mengidentikkan uang elektronik sebagai uang dalam bentuk kartu tetapi uang elektronik tidak hanya dalam bentuk kartu, ada pula uang elektronik dalam bentuk dompet elektronik (*e-wallet*).¹⁷ Pengertian *e-wallet* diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu:

“Dompet Elektronik (*ElectronicWallet*) yang selanjutnya disebut dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan dana instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.”

Dompet elektronik (*e-wallet*) merupakan bagian dari uang elektronik, perbedaan mendasar antara dompet elektronik dengan uang elektronik, yaitu pada *chip-based* dan *server-based*. Uang elektronik pertama kali muncul di Indonesia dalam bentuk *chip* yang tertanam pada kartu atau media lain (*chip based*), kebanyakan uang elektronik dengan *chip based* dalam bentuk kartu

¹⁷Aprilia Ika, 2017, **Uang Elektronik vs Dompet Elektronik, Mana yang Lebih Menarik Digunakan?**, <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/09/28/120000326/uang-elektronik-vs-dompet-elektronik-mana-yang-lebih-menarik-digunakan> (diakses pada 1 November 2018)

seperti Flazz BCA, E-money mandiri, Brizzi BRI, dll.¹⁸ Sedangkan *e-wallet* merujuk pada uang elektronik yang berbasis *server*, dimana dalam penggunaan *e-wallet* harus terhubung dengan *server* penerbit. Di Indonesia terdapat beberapa *e-wallet* seperti T-cash Telkomsel, XL Tunai, dll. Jadi, penggunaan dompet elektronik dapat diakses hanya dengan modal *smartphone*, selanjutnya pengguna sendiri yang akan menentukan cara penggunaannya seperti menggunakan token dan pemindai *QR Code*¹⁹ di *merchant* yang telah bekerjasama dengan penerbit dompet elektronik.

Saat ini penggunaan *e-wallet* melalui *QR Code (Quick Response Code)* sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia semakin banyak digunakan. *QR Code* adalah *image* berupa matriks dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data di dalamnya.²⁰ *QR Code* diciptakan untuk menyampaikan informasi data dengan cepat dan mendapat respon dengan cepat pula. Saat ini banyak produk dan layanan yang menerima pembayaran melalui *QR Code* karena dirasa lebih efektif dan efisien tanpa menggunakan uang tunai. Dalam penggunaan *QR Code* pengguna hanya perlu memindai kode batang (*barcode*) yang tersedia pada *merchant* dengan menggunakan *smartphone* tanpa perlu menggunakan uang tunai (*cashless*) maupun kartu (*cardless*). Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, baik lembaga perbankan maupun lembaga non bank yang

¹⁸*Ibid*,

¹⁹Cecep Supriadi, 2017, **Suatu Aplikasi untuk Semua Kebutuhan**, <https://marketing.co.id/dompet-elektronik-satu-aplikasi-untuk-semua-kebutuhan/> (diakses pada 1 November 2018)

²⁰M. Pasca Nugraha dan Dr. Ir. Rinaldi Munir M. T. 2011. **Pengembangan Aplikasi QR Code Generator dan QR Code Reader dari Data Berbentuk Image**. <http://informatika.stei.itb.ac.id> (diakses pada 08 Oktober 2018)

ingin memberlakukan *QR Code* sebagai alat transaksi harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia.²¹

Hingga saat ini Bank Indonesia telah banyak memberikan izin terkait penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran baik kepada lembaga perbankan maupun non perbankan. Salah satu lembaga perbankan yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menggunakan *QR Code* sebagai alat transaksi pembayaran adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Bank BNI). Bank BNI sedang mengembangkan suatu fasilitas pembayaran melalui aplikasi berbasis *QR Code* bernama yap! (*Your All Payment*) yang dapat diakses melalui *smartphone* untuk transaksi non-tunai (*cashless*) dan tanpa perlu menunjukkan kartu debit atau kreditnya (*cardless*). Sumber dana dari metode pembayaran aplikasi yap! tersebut dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pilihan, yaitu kartu kredit, kartu debit, dan UnikQu.²² Jadi, keberadaan fasilitas pembayaran yap! tersebut dapat dikatakan sebagai pengganti peran mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Dimana dalam penggunaan mesin EDC pengguna harus membawa kartu kredit atau debit. Dengan adanya aplikasi yap! pengguna hanya perlu memindai barcode yang tersedia pada kasir *merchant-merchant* Bank BNI melalui aplikasi yap! di *smartphone*.

Aplikasi pembayaran yap! milik Bank BNI semakin mengembangkan sistemnya dengan cara bekerjasama dengan *e-wallet* lain baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Bagi *e-wallet* dalam negeri (domestik) integrasi tersebut diimplementasikan dengan pemasangan *Quick Response*

²¹Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2018, **Fitur Pembayaran dengan QR Code Harus Kantongi Izin BI**, <http://amp.kompas.com/ekonomi> (diakses pada 06 November 2018)

²²Bank BNI, 2018, <http://yap.id> (diakses pada 08 Oktober 2018)

*Indonesia Standard (QRIS) Code di merchant-merchant BNI.*²³ Jadi QRIS tersebut dapat dipindai dengan *e-wallet* lain selain yap!, QRIS dapat dipindai oleh aplikasi *e-wallet* lokal seperti T-Cash dari Telkomsel, Bank Sinarmas, Maybank, Permata Mobile, dan t-money serta aplikasi-aplikasi domestik lainnya,²⁴ serta dapat menerima *inbound* transaksi dari luar negeri yaitu Singapura melalui aplikasi Liquidpay. Dimana aplikasi Liquidpay merupakan aplikasi pembayaran yang sumber dananya menggunakan kartu kredit yang terhubung dengan Visa dan MasterCard. Menurut Bank BNI kerjasama terintegrasi antar sistem pembayaran digital ini sebagai wujud dukungan Bank BNI dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan devisa negara, karena dapat memudahkan parapendatang dari luar negeri dalam bertransaksi di Indonesia dengan menggunakan *e-wallet* dari negara asal mereka.²⁵

Penggunaan *QR Code* sebagai alat transaksi pembayaran telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur bahwa:

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.
- (2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

²³Kiryanto, 2018, **Yap! Kini Terintegrasi Dengan e-wallet Dalam dan Luar Negeri**, <http://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/4286/yap-kini-terintegrasi-dengan-e-wallet-dalam-dan-luar-negeri> (diakses pada 26 Oktober 2018)

²⁴*Ibid*

²⁵Muhammad Idris, **Aplikasi yap! Kini Terintegrasi dengan e-wallet Dalam dan Luar Negeri**, <https://finance.detik.com/moneter/d-4250845/aplikasi-yap-kini-terintegrasi-dengan-e-wallet-dalam-dan-luar-negeri> (diakses pada 27 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) PBI tentang Uang Elektronik yaitu, Kanal pembayaran merupakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia yang dapat digunakan pengguna untuk mengakses uang elektronik dalam proses otorisasi transaksi pembayaran, antara lain penggunaan teknologi baru seperti *Quick Response (QR) Code*.²⁶ Dapat disimpulkan bahwa bagi uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia untuk dapat ditransaksikan di Indonesia wajib memenuhi 2 (dua) syarat yaitu hanya dapat ditransaksikan dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung GPN serta wajib bekerjasama dengan Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 seperti Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank CIMB Niagadan terhubung GPN.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) terdapat kata hanya dapat yang berarti tidak dapat digantikan. Artinya ketentuan tersebut bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran asing. Apabila ketentuan yang bersifat memaksa tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan sanksi hukum. Namun, terkait dengan pemberian sanksi hukum atas pelanggaran Pasal 39 ayat (1) belum diatur dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
-----	------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------

²⁶Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

		Asal Instansi			
1.	2015	Ando Daniel Habinsaran Hutabarat Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Universitas Indonesia	Mobile Payment Sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai Berkaitan dengan Hukum, Ekonomi, dan Sosial di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum terkait mobile payment di Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan antara mobile payment M-PESA di Kenya dengan Telkomsel T-Cash di Indonesia? 3. Apakah peraturan hukum terkait mobile payment di Indonesia sudah dapat mendukung perkembangan perdagangan secara elektronik? 	<p>Dalam penelitian sebelumnya pembahasan fokus untuk mengetahui pengaturan hukum penggunaan mobile payment di Indonesia, kemudian mengetahui perbandingan antara mobile payment yang berlaku di Kenya dengan mobile payment yang berlaku di Indonesia, serta menganalisis apakah peraturan hukum mengenai mobile payment di Indonesia dapat mendukung perkembangan perdagangan secara elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus pada implikasi yuridis penggunaan <i>qr code</i> dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan</p>

					<i>switching</i> asing dan mengetahui perbandingan pengaturan penggunaan QR Code sebagai alat transaksi pembayaran yang berlaku di Indonesia dan di Singapura.
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji implikasi yuridis dengan adanya pengaturan penggunaan *QR Code* sebagai alat pembayaran elektronik atas kerjasama terintegrasi antara Bank BNI melalui aplikasi yap! dengan Liquidpay dari Singapura. Sehingga hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN *SWITCHING* ASING (Studi Kasus tentang Integrasi Your All Payment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah:

Apa implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini, yaitu:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata Bisnis, yaitu hukum perbankan terkait dengan implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, serta evaluasi dalam hal pengawasan maupun pembentukan Peraturan Bank Indonesia agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat.

b. Bagi Lembaga Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga perbankan sebagai penerbit uang elektronik agar dalam pelaksanaan uang elektronik lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

c. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya pengguna uang elektronik

berbasis *QR Code* dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing dan pengaturannya berdasarkan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi 5(lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang yang di dalamnya memuat tentang dasar alasan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, rumusan masalah yang berisi tentang rumusan permasalahan dalam penelitian sehingga lebih spesifik dan terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisi tentang uraian hal-hal yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian tersebut, serta manfaat penelitian yang menjelaskan berbagai manfaat dari penelitian ini bagi golongan-golongan tertentu.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang gambaran-gambaran umum tentang pembahasan pengertian dan doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan pokok penelitian yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber

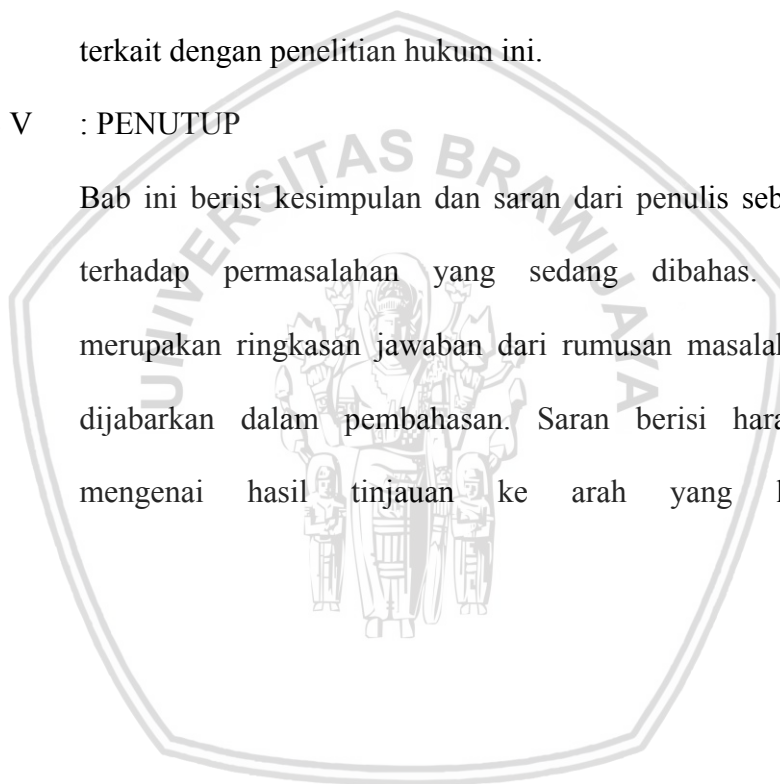
bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta akan menguraikan tentang analisis hukum terhadap permasalahan yang ada, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang terkait dengan penelitian hukum ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bank

1. Definisi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²⁷ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian mengenai bank sendiri telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²⁸

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”²⁹

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip

²⁷Hermansyah, SH., M.Hum., **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 7.

²⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

syariah.³⁰Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Fungsi Perbankan

Fungsi dari perbankan secara jelas telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yaitu “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”. Dapat dikatakan bahwa fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi, karena lembaga perbankan sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lacks of funds*). Lembaga perbankan juga memiliki fungsi lainnya, seperti.³¹

- 1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran
- 2) Mendukung kelancaran transaksi internasional
- 3) Sarana investasi
- 4) Penyimpanan barang berharga, dll.

B. Tinjauan Umum tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank sentral dibentuk sebagai regulator dan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi

³⁰Dadan Mutaqqin, 2008, **Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi**, Safiria Insania Press, Yogyakarta, hlm. 14

³¹Anonim, 2017, **Panduan Perbankan, Perkenalan tentang Bank**, <http://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/> (diakses pada 4 November 2018)

tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi.³²

Kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat bagi masyarakat secara luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta dapat bertindak atas nama sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan. Status dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

1. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain.³³ Kestabilan nilai rupiah tersebut sangat berpengaruh untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tunggal moneter tersebut, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut dilakukan secara berkelanjutan, konsisten,

³²Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H., **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 76

³³*Ibid*, hlm. 80

transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.³⁴

2. Kewenangan Bank Indonesia

Agar dapat mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia yaitu:³⁵

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta
- 3) Mengatur dan mengawasi bank

Tigakewenangan Bank Indonesia tersebut merupakan pilar dalam pencapaian tujuan, karena ketiga tugas tersebut memiliki keterkaitan sehingga harus saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan melalui pengendalian uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas tersebut memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal sebagai sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank telah dialihkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan pengalihan tugas tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya pertentangan dalam menjalankan tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan bank.³⁶ Oleh karena itu, kewenangan BI dalam mengawasi keuangan

³⁴Djoni S. Gazali, S.H., *Op Cit* , hlm. 106

³⁵*Ibid*, hlm. 107

³⁶Dhe Marwathi, 2012, **Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan** (*Establishment and Authority of The Financial Services Authority*), https://www.academia.edu/3217150/PEMBENTUKAN_DAN_KEWENANGAN_OTORITAS_J

lembaga perbankan dan lembaga non bank saat ini beralih kepada OJK. Tetapi, tugas menjaga stabilitas moneter³⁷ dan kelancaran sistem pembayaran tetap menjadi tugas BI, dimana tujuan utamanya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan dan sistem perbankan suatu negara. Sistem pembayaran merupakan alat pemabayaran, prosedur perbankan yang berhubungan dengan pembayaran, dan sistem transfer antar bank yang digunakan dalam proses pembayaran. Definisi sistem pembayaran berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia bahwa:

“Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemidahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Jadi, Bank Indonesia sebagai Bank sentral pada dasarnya memiliki kewajiban mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan sistem yang di inginkan oleh pelaku kegiatan ekonomi.

ASA KEUANGAN ESTABLISHMENT AND AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (diakses pada 28 Februari 2019)

³⁷Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter adalah berhubungan dengan uang dan keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah yang dapat dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan/atau suku bunga (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Bank Indonesia)

Definisi sistem pembayaran menurut Lisfield dan Montes Negret (1994), sistem pembayaran merupakan peraturan, standard, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.³⁸

Sedangkan menurut Mutaqqin dalam Purusitawati (2000), sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang di dalamnya terkandung hukum, standar, prosedur, dan mekanisme teknis operasional pembayaran yang digunakan dalam pertukaran nilai uang antara dua pihak dalam satu wilayah negara maupun internasional dengan memakai instrumen pembayaran yang diterima dan disepakati sebagai alat pembayaran.³⁹

Sesuai dengan amanat UU tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu dengan cara menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan tentang keamanan dan efisien bagi penggunaannya. Unsur-unsur dari sistem pembayaran yang harus diperhatikan meliputi:⁴⁰

- (1) Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran
- (2) Lembaga/organisasi yang terkait dengan sistem pembayaran
- (3) Sistem hukum yang berlaku
- (4) Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan

³⁸<http://digilib.unila.ac.id/4516/15/BAB%20II.pdf> (diakses pada 30 Oktober 2018)

³⁹<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/10323/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (diakses pada 30 Oktober 18)

⁴⁰Djoni S. Gazali, *Op Cit*, hlm. 111

1. Jenis Alat Pembayaran

Secara umum alat pembayaran dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

1) Tunai

Dalam sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kartal masih memiliki peran penting dalam transaksi pembayaran terutama dalam transaksi bernilai kecil. Seiring dengan perkembangan zaman penggunaan uang kartal dianggap kurang efisiensi, karena dalam melakukan transaksi dengan jumlah besar maka harus membawa uang dalam jumlah banyak yang dapat mengakibatkan berbagai risiko seperti hilangnya uang, pencurian atau perampokan, pemalsuan uang, uang rusak, dll. Sehingga dalam penggunaan uang kartal tersebut juga membutuhkan biaya pengadaan dan pengelolaan yang cukup mahal.

2) Non Tunai

Pada awalnya alat pembayaran non tunai merupakan suatu alat pembayaran dan mempunyai bentuk fisik seperti kartu. Dalam sistem pembayaran non tunai instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debet, maupun uang elektronik. Uang elektronik merupakan alat prabayar yang bentuknya juga berupa kartu, namun saat ini uang elektronik tidak hanya digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, karena uang elektronik ada yang berbentuk kartu (*chip based*) dan non kartu (*server based*). Dalam menjamin kelancaran sistem pembayaran diperlukan pengaturan dan

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta kewenangan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya kepada Bank Indonesia.⁴¹

D. Tinjauan Umum tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Pengertian mengenai GPN telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

“Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas *standar*, *switching*, dan *service* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara online.”

Gerbang Pembayaran Nasional merupakan sistem pembayaran jaringan domestik yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Bank Indonesia memberlakukan GPN sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar *switching* dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia memiliki 3 (tiga) sasaran utama dalam implementasi GPN, yaitu:⁴²

- 1) Menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otoritas, kliring, dan setelmen secara domestik.
- 2) Meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi.
- 3) Meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.

⁴¹*Ibid*, hlm. 112

⁴²Agusman, **Siaran Pers Bank Indonesia**, 2017, <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages> (diakses pada 31 Oktober 2018)

Keuntungan dengan diberlakukannya GPN yaitu GPN menawarkan biaya yang lebih rendah daripada kartu dengan jaringan internasional seperti Visa, MasterCard, JCB, UnionPay, dan American Express. Ruang lingkup penggunaan GPN telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN yaitu:

Ruang Lingkup GPN (NPG) mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi:

- (a) Interkoneksi *switching*
- (b) Interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal ATM, *electronic data capture* (EDC), agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya; dan
- (c) interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.

Saat ini GPN hanya berlaku untuk kartu debit dan uang elektronik *chip-based*, sedangkan untuk kartu kredit masih menggunakan sistem pembayaran dengan jaringan internasional karena masyarakat yang berpergian ke luar negeri cenderung melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit.⁴³ Transaksi kartu kredit di Indonesia saat ini masih didominasi oleh prinsipal kartu kredit asing, yaitu American Express, JCB, Mastercard, Visa Card, dan China Union Pay.⁴⁴

E. Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik

Inovasi dalam pembayaran masih berlanjut hingga saat ini dan disebut generasi keempat sebagai alat pembayaran, yaitu transaksi pembayaran elektronik atau dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran non tunai

⁴³Tommy Kurnia, 2018, **Menukar Kartu Debit dengan yang Berlogo GPN Hukumnya Wajib?**, <http://liputan6.com> (diakses pada 15 November 2018)

⁴⁴Remon Samora, 2017, **Babak Baru Sistem Pembayaran GPN**, <https://m.kontan.co.id> (diakses pada 15 November 2018)

(*noncash electronic funds transfer system*).⁴⁵ Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai transaksi elektronik, yaitu

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer*, dan/atau media elektronik lainnya”

Pembayaran dengan menggunakan kartu elektronik merupakan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi maupun jaringan komunikasi. Alat pembayaran elektronik yang banyak dikenal oleh masyarakat berupa kartu kredit dan kartu debit berupa ATM, *phone banking*, dan *internet banking*. Seiring dengan kemajuan teknologi, lembaga perbankan melakukan inovasi dalam bidang finansial yaitu dengan mengembangkan fasilitas uang elektronik (*e-money*).

F. Tinjauan Umum tentang Uang Elektronik (*E-money*)

Uang Elektronik (*e-money*) awalnya dikenal dengan sebutan kartu penyimpan dana (*stored value card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Nilai uang yang tersimpan dalam *stored value card* ini yang disebut dengan uang elektronik (*e-money*). Pada dasarnya Uang Elektronik merupakan uang tunai yang dikonversikan menjadi data elektronik yang disimpan pada media penyimpan pada kartu yang disebut *chip* atau dalam bentuk media *server* bagi pemegang uang elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

⁴⁵ Aulia Pohan, 2011, **Sistem Pembayaran**, Jakarta, Rajawali Press, hlm 54

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- 3) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dilihat dari media yang digunakan, ada 2 (dua) tipe produk uang elektronik (*e-money*) yaitu:⁴⁶

- 1) *Prepaid Card/Kartu Prabayar/Electronic Purses*, dengan karakteristik:
 - a) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu
 - b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.
- 2) *Prepaid Software* (disebut juga *digitalcash*), dengan karakteristik:
 - a) Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu *hard disk computer* yang terdapat dalam *Personal Computer* (PC)
 - b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Berdasarkan media yang digunakan, uang elektronik *chip-based* digolongkan sebagai *prepaid card* atau kartu prabayar karena nilai uang elektronik tersebut tertanam pada kartu dan pemindahan dananya dapat dilakukan secara *offline* melalui *card reader*. Sedangkan uang elektronik *server-based* digolongkan sebagai *prepaid software* karena nilai uang elektronik tersebut disimpan pada media elektronik atau *smartphone*, untuk mengakses atau pemindahan dananya harus terhubung internet (*online*). Uang elektronik jenis ini dapat disebut sebagai dompet elektronik (*e-wallet*). Pengertian *e-wallet* diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu:

⁴⁶R. Serfianto, dkk, **Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik**, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 98

“Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan dana instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran”.

Uang elektronik tidak hanya dalam bentuk kartu, ada pula uang elektronik dalam bentuk dompet elektronik (*e-wallet*).⁴⁷ *E-wallet* merupakan layanan elektronik yang digunakan untuk menyimpan dana yang digunakan dalam proses pembayaran. layanan elektronik yang dimaksud adalah untuk mengaksesnya harus terhubung dengan internet. Penggunaan dana pada dompet elektronik, yaitu:⁴⁸

- (1) Dana yang ditampung pada dompet elektronik hanya dapat digunakan untuk tujuan pembayaran.
- (2) Tujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mencakup:
 - a. Pembayaran transaksi belanja (*purchasing*); dan
 - b. Pembayaran tagihan
- (3) Dana yang ditampung pada dompet elektronik tidak dapat dipindahkan ke dompet elektronik lain.

1. Manfaat Uang Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, uang elektronik semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik, seperti:⁴⁹

- 1) Penggunaan dalam pembayaran menjadi mudah, hanya dengan menempelkan kartu maupun transaksi secara *mobile*
- 2) Meminimalkan penggunaan uang kartal, sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang, dan meminimalisir resiko pencurian
- 3) Baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dll

⁴⁷ Aprilia Ika, *Op Cit*,

⁴⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

⁴⁹ Bank Indonesia, 2018, **Edukasi Uang Elektronik**, <http://www.bi.go.id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

Dalam transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik terdapat hubungan terpenting yaitu hubungan antara penerbit, pemegang dan pedagang (*merchant*). Nilai uang elektronik dapat diperoleh dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau melalui pendebitan rekening pada bank penerbit untuk kemudian disimpan dalam bentuk *e-money*. Bagi pengguna uang elektronik dengan *chip based* yang tertanam pada kartu, pemindahan nilai elektronik terjadi apabila ada transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik pada pedagang (*merchant*) melalui suatu mesin khusus untuk kartu (*card reader*). Sedangkan untuk pemindahan dana melalui uang elektronik *server-based*, salah satunya dapat dilakukan dengan cara memindaibarcodes atau *QR Code* yang disediakan oleh *merchant* melalui *smartphone* pengguna. Dimana dalam proses pemindahan dana dari pengguna kepada *merchant* dilakukan oleh lembaga *switching*.

G. Tinjauan Umum tentang QR Code

Quick Response Code atau disebut dengan *QR Code* adalah bentuk enkripsi suatu data dengan bentuk menyerupai matrik yang tersusun secara horizontal dan vertikal, tujuan utamanya sebagai simbol yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh alat *scanner*.⁵⁰ Pada umumnya, *QR Code* dapat dibaca menggunakan kamera pada *smartphone*. Jadi, fungsi *QR Code* tersebut adalah untuk menyampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh perusahaan atau penyedia jasa layanannya. *QR Code* banyak digunakan dalam

⁵⁰Th. Devi Inriasari dan Flourensia Spty Rahayu, 2012, **Analisis dan Perancangan Layanan Perpustakaan UAJY Berbasis Mobile dengan Memnafaatkan QR Code**, <http://e-journal.ujay.ac.id/5556/1/TF76301.pdf> (Diakses pada 1 November 2018)

berbagai aspek kehidupan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu.

Saat ini *QR Code* telah banyak digunakan dalam bidang finansial yaitu sebagai sistem pembayaran elektronik untuk transaksi di *outlet* maupun *e-commerce*. Penggunaan *QR Code* dalam transaksi perdagangan dianggap lebih praktis dan efisien, yaitu hanya dengan memindai *Code QR* yang tersedia pada *merchant* yang telah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik tersebut. Dalam mengembangkan standar teknologi *QR Code* Bank Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Jadi, keberadaan teknologi *QR Code* dapat dikatakan sebagai pengganti peran mesin EDC (*Electronic Data Capture*), karena dalam penggunaan mesin EDC membutuhkan biaya perawatan yang cukup mahal. Sedangkan dalam penggunaan *QR Code*, *merchanthanya* perlu menyediakan satu stiker *QR Code* karena standarisasi *QR Code* memuat beberapa aspek yang salah satunya yaitu interkoneksi sehingga pembayarannya dapat digunakan lintas layanan.⁵¹ Penggunaan *QR Code* sebagai alat transaksi pembayaran ini bertujuan untuk mendukung program Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan *cashless society*, karena standarisasi *QR Code* ini memuat 4 (empat) aspek yaitu interoperabilitas, interkoneksi, keamanan, dan inklusi.⁵²

⁵¹Desy Setyowati, 2018, **12 Perusahaan Dapat Izin Pembayaran *QR Code* dari BI**, <https://katadata.co.id/berita/2018/04/23/12-perusahaan-dapat-izin-pembayaran-qr-code-dari-bi> (diakses pada 7 Januari 2019)

⁵²*Ibid*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis-normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵³ Penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum.

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mempertimbangkan fokus utama penelitian yaitu untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini terdiri dari dua macam pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma tersebut berada pada sebuah peraturan perundang-undangan

⁵³Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 293

yang bersifat khusus atau umum, atau berada pada peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.⁵⁴

Dalam penelitian ini juga menggunakan peraturan legislasi dan regulasi, maksudnya dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu tentang implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵⁵ Kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam penelitian nomatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.⁵⁶

Penulis menggunakan studi kasus yaitu mengenai kerjasama terintegrasi antara aplikasi yap! milik Bank BNI dengan LiquidPay Singapore, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing. Permasalahan ini bukan kasus yang berbentuk putusan pengadilan

⁵⁴I Made Pasek Diantha, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, hlm. 159

⁵⁵Dr. Johny Ibrahim, S.H., M.Hum, **Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 321

⁵⁶*Ibid*,

namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua kasus yang diteliti harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

3) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis dimana penulis ingin mengkaji dan menemukan makna yang dikandung dalam istilah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan implikasi yuridis penggunaan *QRCode* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing.

4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan sebagai cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya.

Dalam penelitian ini penulis memilih Singapura sebagai objek perbandingan karena aplikasi Liquidpay milik Singapura telah terintegrasi dengan *e-wallet* dalam negeri yaitu yap! milik Bank BNI. Kedua *e-wallet* tersebut berbasis *QR Code* yang dapat diakses dengan cara memindai

⁵⁷*Ibid*, hlm. 31

Kode *QR* pada *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank BNI. Sebenarnya Bank BNI tidak hanya bekerjasama dengan Liquidpay tetapi juga bekerjasama dengan *e-wallet* yang berasal dari China yaitu Alipay dan Wechatpay. Namun, kedua *e-wallet* tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam PBI tentang GPN yaitu untuk dapat ditransaksikan di Indonesia harus menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga *switching* domestik. Dalam hal ini Alipay dan Wechatpay telah menjadi anggota pada 2 (dua) lembaga *switching* yang telah memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia, salah satunya adalah PT. Alto Halo Digital Internasional (AHDI), anak perusahaan *switching* Alto Networks.⁵⁸ Sedangkan Liquidpay masih terhubung dengan *switching* asing yaitu Visa dan Mastercard.

Perbandingan ini juga dikarenakan Singapura sebagai negara pusat *Fintech* di Asia dan penggunaan *mobile payment* sebagai alat transaksi pembayarannya telah meningkat sebesar 53% sejak tahun 2017. Sehingga Indonesia dapat belajar dari Singapura dalam mengembangkan sistem GPN melalui instrumen pembayaran non tunai khususnya uang elektronik berbasis *QRCode* guna mendukung efektivitas proses transaksi dengan tetap menguntungkan kepentingan nasional.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, jenis bahan hukum yang digunakan adalah:

1) Bahan Hukum Primer

⁵⁸Maizal Walfajri, 2018, **Wechat, Alipay, dan Liquidpay Masuk Indonesia Lewat BNI**, <http://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/wechat-alipay-dan-liquidpay-masuk-Indonesia-lewat-bni> (diakses pada 26 Maret 2019)

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat, yaitu implikasi yuridis penggunaan *QRCode* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching*asing. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terkait penelitian ini. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.⁵⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku teks termasuk di dalamnya skripsi dan tesis hukum, jurnal hukum, serta pendapat para ahli hukum berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu implikasi yuridis penggunaan *QRCode* dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier tersebut berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, makalah, karya ilmiah, serta situs internet yang layak serta berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Sumber Bahan hukum yang digunakan dengan melakukan penelusuran bahan hukum yang peneliti peroleh dari :

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140

- a. Perpustakaan Universitas Brawijaya
- b. Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- c. Perpustakaan lainnya

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh data dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel hukum, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dengan melakukan penelusuran bahan hukum yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Universitas Brawijaya
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- c. Perpustakaan lainnya

2) Internet

Cara penulis untuk memperoleh data dengan mencari isu hukum yang diteliti melalui internet, dengan mengakses situs-situs resmi seperti *e-book*, *e-journal*, serta artikel online, dan berita online yang terverifikasi kebenarannya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan yaitu:

- 1) Penafsiran gramatikal, merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁶⁰
- 2) Penafsiran sistematis, penafsiran yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara menganalisis dan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun satu pasal dengan pasal yang lain.

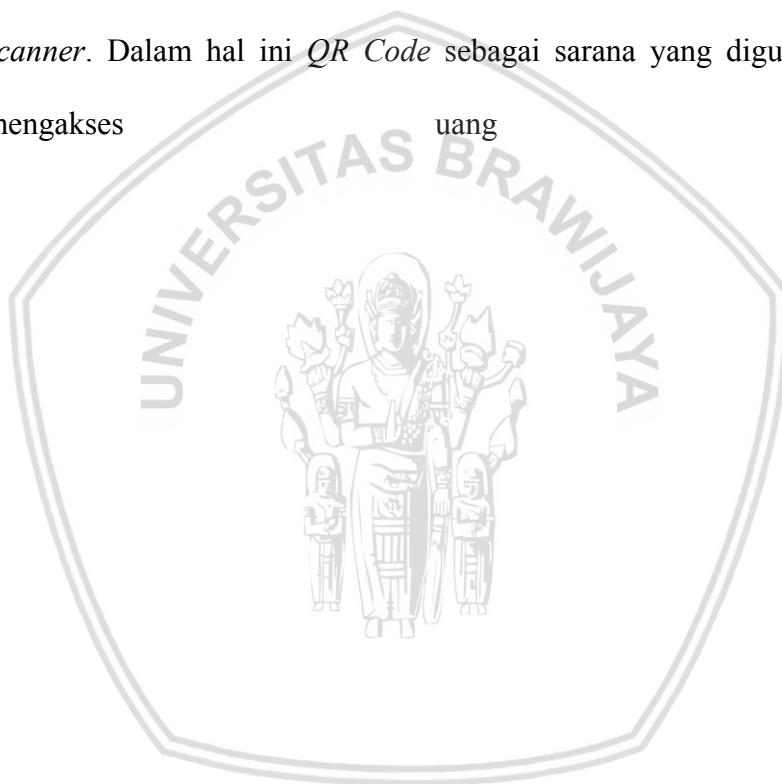
F. Definisi Konseptual

- a. Implikasi yuridis adalah akibat hukum dari sebuah produk hukum yang telah disahkan dan diterapkan dalam sistem tatanan masyarakat. Dalam hal ini terkait pengaturan penggunaan uang elektronik berbasis *QRCode* yang hanya dapat digunakan dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN.
- b. Integrasi merupakan sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh, dalam hal ini yaitu integrasi antara aplikasi yap! milik Bank BNI dengan LiquidPay dari Singapore.
- c. Kanal Pembayaran merupakan sarana yang disediakan untuk mengakses Uang Elektronik dalam proses transaksi pembayaran, dalam hal ini yang dimaksud kanal pembayaran adalah aplikasi uang elektronik yaitu yap! dan Liquidpay.
- d. *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang

⁶⁰Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 171

menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.

- e. Uang Elektronik (*E-money*) merupakan uang tunai yang dikonversikan menjadi data elektronik, dalam hal ini uang elektronik dalam bentuk *server* berbasis *QR Code*.
- f. *QR Code* (*Quick Response Code*) adalah bentuk enkripsi suatu data sebagai simbol yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh alat *scanner*. Dalam hal ini *QR Code* sebagai sarana yang digunakan untuk mengakses uang elektronik.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Penggunaan *QR Code* dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank dengan Menggunakan Kanal Pembayaran yang Terhubung dengan *Switching* Asing

1. Analisis Pengaturan Tentang Penggunaan *QR Code* dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank dengan Menggunakan Kanal Pembayaran yang Terhubung dengan *Switching* Asing dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sistem pembayaran merupakan salah satu syarat terciptanya tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan proses pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Proses pemindahan dana tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media yang ada, mulai dari media yang sangat sederhana hingga media yang sangat kompleks. Peran sistem pembayaran sangat penting bagi perekonomian suatu negara, karena sistem pembayaran digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.⁶¹ Oleh karena itu sistem pembayaran harus diawasi agar dapat berjalan dengan aman dan lancar. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), salah satu tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.⁶² Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia

⁶¹ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Op Cit*, hlm. 5

⁶² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7

memiliki beberapa kewenangan, salah satunya yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran.⁶³

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis alat pembayaran yaitu secara tunai dan non tunai. Alat pembayaran secara tunai yaitu alat pembayaran yang menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang⁶⁴ tunai dengan mata uang rupiah yang terbuat dari kertas dan logam dengan bentuk dan syarat-syarat yang ditentukan khusus oleh undang-undang.⁶⁵ Dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, dan aman, Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap sistem yang telah ada sesuai dengan perencanaan sistem pembayaran nasional. Penyempurnaan dan pengembangan sistem pembayaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, pengembangan mekanisme, infrastruktur dan ketentuan yang diarahkan untuk meminimalisir risiko antar bank, serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.⁶⁶

Perkembangan teknologi dan kemajuan sistem keuangan modern telah merubah tatanan kehidupan masyarakat ke arah pemanfaatan teknologi, salah satunya adalah perubahan alat pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Sistem pembayaran non tunai merupakan bagian dari Inovasi Keuangan Digital (IKD) yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa

⁶³Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7

⁶⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁶⁵Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁶⁶Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Op Cit*, hlm 31

keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁶⁷ IKD berperan penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, dan luas sehingga dapat menjangkau daerah terpencil⁶⁸ karena salah satu kriteria IKD yaitu mendukung inklusi dan literasi keuangan.⁶⁹ Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan kemudahan akses produk finansial. Kebijakan tersebut juga bertujuan agar masyarakat dapat melihat uang dari sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis instrumen pembayaran non tunai berdasarkan fisik alat yang digunakan, yaitu:⁷⁰

1. Instrumen-instrumen berbasis warkat/kertas atau *paper based instruments*
2. Instrumen-instrumen berbasis kartu atau *card based instruments*
3. Instrumen-instrumen berbasis elektronik atau *electronic based instruments*

Sistem pembayaran non tunai di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1990an didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, dan pengembangan kegiatan keuangan baru. Pada awalnya lembaga perbankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran melalui penerbitan instrumen pembayaran berbasis warkat seperti cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit. Kemudian Bank Indonesia menetapkan instrumen non tunai berbasis kartu (APMK) seperti kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit.

⁶⁷Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

⁶⁸Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

⁶⁹Pasal 4 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

⁷⁰Bank Indonesia, 2006, **Persepsi, Preferensi, dan perilaku masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Sistem Pembayaran Non Tunai**, hlm. 7

Seiring berkembangnya teknologi berkembang pula instrumen pembayaran non tunai yang sebelumnya hanya dalam bentuk warkat dan kartu, saat ini muncul instrumen pembayaran non tunai berbasis elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak hanya dapat diterbitkan oleh pihak bank tetapi juga dapat diterbitkan oleh lembaga selain bank (LSB). Uang Elektronik saat ini banyak digunakan oleh masyarakat karena dianggap lebih praktis, efisien, dan aman karena dapat memudahkan penggunaanya dalam melakukan transaksi. Bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi menggunakan uang elektronik tidak perlu lagi membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak cukup hanya dengan membawa uang elektronik.

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu *mediachip* (kartu) atau *server* (*digital/smartphone*) yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.⁷¹ Uang Elektronik (*e-money*) memiliki kedudukan yang sama dengan uang kartal yaitu sebagai alat pembayaran. Dalam konsep keuangan, uang elektronik (*e-money*) telah memenuhi syarat sebagai benda yang dapat difungsikan menjadi uang, seperti mudah dibawa, mudah disimpan, tahan lama, dan diakui.⁷² Karena pada dasarnya uang elektronik merupakan uang yang dikonversikan dalam media elektronik. Dalam PBI tentang Uang Elektronik juga membagi uang elektronik menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

Pencatatan data identitas Pengguna berupa:⁷³

- 1) Unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan

⁷¹ Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

⁷² Solikin Suseno, 2002, **Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian**, Seri Kebansentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, hlm. 4

⁷³ Pasal 3 ayat (2) huruf b PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

- 2) Registered, yaitu uang elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

Uang elektronik berbasis *chip* biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik *unregistered*, karena tidak terregistrasi sehingga kartu tersebut dapat digunakan oleh siapapun yang memegangnya. Sedangkan uang elektronik berbasis *server* termasuk dalam jenis uang elektronik *registered* atau terregistrasi, karena pada saat penerbitan uang elektronik data identitas pemegang akan disimpan atau didata oleh penerbit uang elektronik. Penggunaannya harus melalui identifikasi nomor telepon atau akun daring (*online*) dan harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya dan lebih aman.⁷⁴ Jadi, penggunaan uang elektronik berbasis *server* ini untuk transaksi pembayaran secara *online* melalui *web browser* atau aplikasi dalam *smartphone* tanpa perlu menggunakan kartu, sehingga uang elektronik *server-based* tersebut dapat disebut sebagai *e-wallet*. Sumber dana uang elektronik dapat diperoleh melalui pengisian saldo, kartu debit, dan kartu kredit.

Tujuan penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran adalah untuk mendukung program Bank Indonesia dan OJK yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga akan terbentuk masyarakat yang dominan menggunakan instrumen non tunai (*cashless society*). Program *cashless society* bertujuan untuk mengurangi peredaran uang di Indonesia guna

⁷⁴Rifqy Tazkiyyaturrohman, 2016, **Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah**, http://digilib.uin-suka.ac.id/22255/1/1420311025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (diakses pada 5 Januari 2019)

menjaga kestabilan nilai rupiah. Transaksi dengan menggunakan instrumen non tunai banyak memberikan keuntungan bagi banyak pihak, yaitu:⁷⁵

1. Aman dan praktis, dalam bertransaksi menggunakan alat pembayaran non tunai menjadi lebih aman karena tidak perlu membawa uang dengan jumlah banyak ketika akan melakukan transaksi sehingga lebih praktis karena hanya perlu membawa uang elektronik *chip based* ataupun *server based*.
2. Menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan *cash handling*, penggunaan alat pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk mencetak uang.
3. Perencanaan ekonomi lebih akurat, transaksi dengan menggunakan alat pembayaran non tunai menjadi lebih lengkap dan mudah dilacak. Hal tersebut akan memudahkan Bank Indonesia dalam menghitung aktivitas ekonomi.
4. Penggunaan alat pembayaran non tunai akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian, karena perputaran uang yang semakin cepat di masyarakat akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari *money multiplier*.

Program *cashless society* semakin didukung dengan diberlakukannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN merupakan *switching* nasional untuk berbagai transaksi antar bank yang dilakukan melalui *front end delivery channel*⁷⁶, seperti ATM, EDC, internet, telepon, dan *mobile payment*.⁷⁷ Penyelenggaraan GPN dilakukan secara bersama-sama antara lembaga standar, lembaga *switching*, dan lembaga *services* serta didukung oleh pihak-pihak yang terhubung dengan GPN seperti penerbit, *acquirer*,

⁷⁵Indah Mustikasari, 2017, **Analisis Perkembangan Cashless Society di Indonesia**, <https://iprice.co.id/trend/insights/wawasan-mingguan-tren-cashless-society-di-indonesia/> (diakses pada 3 Februari 2019)

⁷⁶*Front End Delivery Channel* merupakan saluran atau media yang digunakan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan seperti EDC, ATM, *internet*, telepon, *mobilephone*, dll. Lihat Bank Indonesia, 2011, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011*, Jakarta, hlm. 82

⁷⁷Bank Indonesia, **Pengantar Sistem Pembayaran**, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. hlm. 24

penyelenggara *Payment Gateway*, dan pihak-pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁷⁸

Dalam pelaksanaan GPN lembaga standar berperan dalam menyusun dan mengembangkan standarisasi transaksi, serta mengelola standar tersebut.⁷⁹ Lembaga *switching* bertugas untuk memfasilitasi penerusan data transaksi pembayaran secara domestik sehingga dapat terjadi proses integrasi transaksi.⁸⁰ Sedangkan lembaga *services* berperan dalam memberikan layanan operasional, menjaga keamanan transaksi, memastikan perlindungan nasabah, serta mengembangkan perluasan akseptasi.⁸¹ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG) mengatur mengenai ruang lingkup GPN yaitu:

Ruang lingkup GPN (NPG) mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi:⁸²

1. Interkoneksi *switching*
2. Interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa ATM, *electronic data captured* (EDC), agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya; dan
3. Interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.

GPN bertujuan untuk interkoneksi yaitu keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lain dan interoperabilitas yaitu instrumen pembayaran dapat digunakan pada

⁷⁸Pasal 5 ayat (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

⁷⁹Bank Indonesia, **Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, hlm. 162

⁸⁰*Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana (Pasal 1 angka 5 PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran)

⁸¹Bank Indonesia, **Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, *Op. Cit.*, hlm. 162

⁸²Pasal 3 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

infrastruktur lain selain dari infrastruktur penerbit. Oleh karena itu adanya kebijakan GPN dapat menekan biaya untuk belanja modal infrasturktur oleh lembaga perbankan.⁸³ Seluruh instrumen dan kanal pembayaran yang ditransaksikan di Indonesiawajib terhubung GPN guna mendukung kebijakan nasional agar pertumbuhan industri jasa sistem pembayaran tidak menghambat pemberlakuan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia, dan otoritas terkait.⁸⁴

Sebelum adanya kebijakan GPN seluruh transaksi keuangan non tunai di Indonesia menggunakan sistem pembayaran asing seperti Mastercard, Visa, Union Pay, American Express, dan lain sebagainya, sehingga seluruh transaksi keuangan yang dilakukan di Indonesia pemrosesannya dilakukan di luar negeri dan mengakibatkan biaya yang dikenakan untuk setiap transaksinya menjadi mahal. Dengan adanya GPN biaya yang dikenakan pada saat transfer antar bank atau tarik tunai pada mesin ATM bank lain menjadi lebih murah bahkan gratis, sehingga dapat menekan biayaadministrasi bulanan di bank, biaya transfer hingga biaya cek saldo karena seluruh sistem pembayaran di Indonesia sudah terkoneksi dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara menjadi lebih murah.⁸⁵ Segala kemudahan yang diberikan dengan berlakunya GPN tersebut dimaksudkan agar industri jasa sistem pembayaran dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan kapasitas penggunaan instrumen non tunai.

⁸³Sylke Febrina Laucereno, 2017, **GPN, Sistem yang Bakal Bikin Biaya Transfer Antar Bank Lebih Murah**, <https://m.detikk.com/finance/moneter> (diakses pada 7 Januari 2019)

⁸⁴Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

⁸⁵*Ibid*

Implementasi GPN dilakukan secara bertahap, untuk tahap awal GPN diterapkan pada kartu ATM/debit dan uang elektronik berbasis *chip*.⁸⁶ Pada tahap selanjutnya GPN akan diterapkan pada kartu kredit dan uang elektronik *server-based*. Dengan berlakunya GPN saat ini, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk dapat memberikan daya dukung optimal bagi terciptanya sistem pembayaran nasional, sehingga saat ini berfokus pada 3 (tiga) besaran strategi yang dilakukan secara simultan, yaitu:⁸⁷

- a. Mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran ritel domestik di bawah payung GPN
- b. Memperluas program elektronifikasi
- c. Merespon akselerasi ekonomi digital, khususnya teknologi finansial (tekfin) secara berimbang

Walaupun untuk saat ini kebijakan GPN masih pada tahap awal yaitu pada kartu debit dan uang elektronik berbasis *chip* tetapi implementasi GPN pada ekosistem uang elektronik *server-based* untuk saat ini sangat dimungkinkan mengingat tiga fokus besaran strategi tersebut yang dilakukan secara simultanserta peningkatan sistem operasi dan peningkatan penggunaan *smartphone* di kalangan masyarakat akan mengarah pada layanan *mobile payment*. *Mobile payment* akan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, secara khusus pada vertikal *fintech* dan secara umum pada lanskap keuangan.⁸⁸

⁸⁶Bank Indonesia, 2018, **Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, hlm 163

⁸⁷*Ibid*, hlm 160

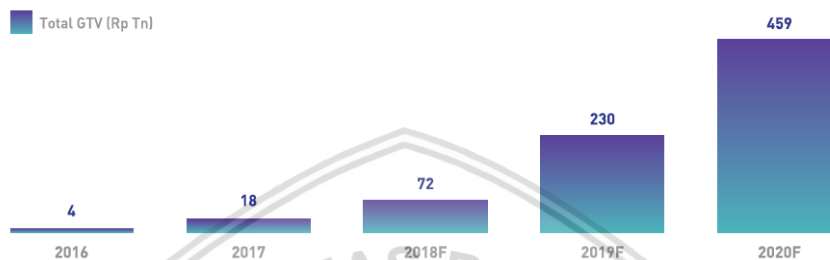
⁸⁸Randi Eka, 2018, **Tren Perkembangan Mobile Payment di Indonesia**, <https://dailysocial.id/post/perkembangan-mobile-payment-indonesia/> (diakses pada 14 Februari 2019)

Diagram 1.1

Perkiraan Penggunaan *MobilePayment* Tahun 2016-2020

Based on our estimate, Indonesia's mobile payment market will reach IDR 459 Tn (~US\$30 Bn) in total GTV by 2020, reaching a CAGR of 158% between 2016-2020.

FIGURE 24 | Indonesia Mobile Payment GTV - 2016-2020 (Forecasted)



Source: MDI Ventures & Mandiri Sekuritas Research

Sumber: diolah bahan hukum sekunder 2019

Pada tahun 2017 sebuah penelitian oleh Statistika memperkirakan bahwa nilai transaksi pembayaran menggunakan *mobile payment* di Indonesia akan meningkat sepanjang tahun 2016-2020. *Mobile payment* kebanyakan digunakan untuk transaksi ritel, seperti membayar transportasi *online*, membeli pulsa, membayar parkir, hingga membeli makanan. Sebagian besar layanan *mobile payment* di Indonesia saat ini mensubsidi setiap transaksi melalui *cashback*, diskon dengan pedagang, hingga potongan harga untuk menarik penggunaannya.⁸⁹

Semakin berkembangnya *mobile payment* di Indonesia semakin besar pula peluang efisiensi pemberlakuan GPN, karena penetrasi *smartphone* yang telah melampaui kepemilikan akun bank oleh masyarakat. Penggunaan uang elektronik *server-based/mobile payment* dalam transaksi pembayaran juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Upaya dalam meningkatkan

⁸⁹*Ibid*,

inklusi keuangan dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat sebagai nasabah untuk mengoptimalkan jasa keuangan berbasis perbankan. Namun, dengan pendekatan berbasis aplikasi seperti ini mampu menjadikan masyarakat teredukasi secara sendirinya.⁹⁰

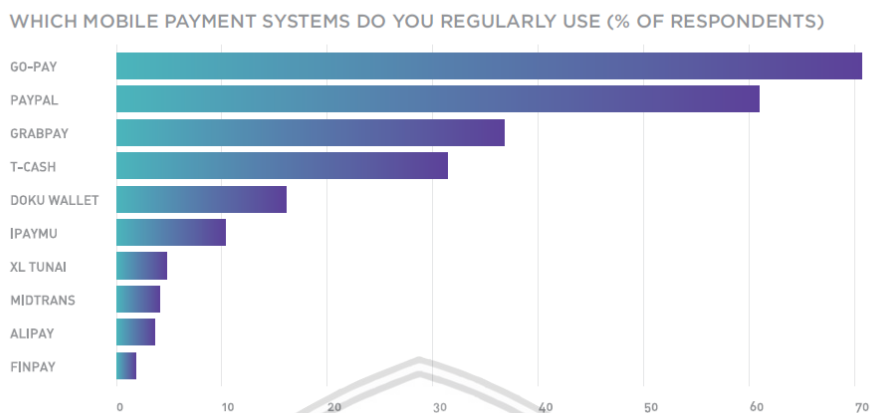
Saat ini banyak penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menciptakan produk uang elektronik *server based/mobile payment* yang dapat diakses hanya dengan menggunakan *smartphone* seperti uang elektronik berbasis *QR Code*. Uang elektronik berbasis *QR Code* banyak diminati oleh masyarakat karena cakupannya yang lebih luas, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses uang elektronik untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan diberlakukannya GPN menuntut penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk uang elektronik berbasis *QR Code* untuk mulai mempersiapkan produknya untuk terhubung GPN.

Uang elektronik berbasis *QR Code* ini menawarkan pembayaran elektronik yang lebih efektif karena penggunaannya lebih sederhana. Jika dalam menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik *chip-based* perlu menggunakan mesin EDC yang membutuhkan biaya retensi pedagang, maka dengan pembayaran berbasis *QR Code* hanya perlu menyediakan stiker Kode *QR* di *merchant* yang telah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik untuk memfasilitasi pembayaran.

Diagram 1.2

⁹⁰Joshua Agusta, 2018, *Mobile Payments in Indonesia: Race to Big Data Domination*, <https://medium.com/@joshuaagusta/mobile-payments-in-indonesia-race-to-big-data-domination-e1fb23211fc4> (diakses pada 6 Februari 2019)

FIGURE 19 | Most Popular Mobile Payment Brand in Indonesia



Source: Financial Times¹¹

Mobile Payment di Indonesia

Sumber: Diolah dari bahan hukum sekunder, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa semakin banyaknya penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menyediakan layanan pembayaran uang elektronik *server-based* berbasis *QR Code* seperti, Go-Pay, OVO, T-Cash, dan lain-lain. Penggunaan uang elektronik berbasis *QR Code* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah Go-Pay dari aplikasi Go-Jek, dapat dikatakan Go-Pay sebagai dompet kedua bagi masyarakat, karena dapat digunakan untuk semua layanan.

Penggunaan *QRCode* sebagai alat transaksi pembayaran telah diatur dalam Pasal 39 PBI tentang Uang Elektronik yaitu:⁹¹

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.
- (2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja samadengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori

⁹¹Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

Adanya ketentuan tersebut mewajibkan bagi uang elektronik (termasuk uang elektronik berbasis *QR Code*)⁹² yang diterbitkan oleh negara lain dan ditransaksikan di Indonesia harus menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN dan bekerjasama dengan bank yang tergolong BUKU 4 dan terhubung GPN. Artinya, untuk seluruh transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan di Indonesia tidak boleh terhubung dengan lembaga *switching* asing. Hal ini dikarenakan GPN digunakan sebagai landasan untuk pemrosesan transaksi pembayaran massal melalui proses integrasi atas seluruh kanal pembayaran dan pemrosesan transaksi non tunai di Indonesia yang selama ini belum efisien. Oleh karena itu, dalam aturan dan mekanisme GPN ditentukan bahwa untuk seluruh transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan di dalam negeri wajib dilakukan dengan pemrosesan domestik pula.⁹³

Terhubungnya instrumen pembayaran non tunai dengan GPN diharapkan dapat menambah pendapatan nasional, karena selama ini seluruh proses transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan di Indonesia terhubung dengan *switching* asing, sehingga biaya untuk tiap transaksinyaberalih menjadi pendapatan negara lain. Dengan adanya GPN dan skema harga yang lebih murah dibandingkan dengan skema harga internasional diharapkan dapat memperluas akseptasi instrumen pembayaran non tunai oleh masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Keterhubungan GPN juga menjadi

⁹²Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

⁹³Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN

bagian yang menyatu dari upaya Bank Indonesia dalam memfasilitasi Gerakan Nasional Non Tunai. Dalam penyelenggaraan GPN tetap perlu mengedepankan kepentingan nasional, mendorong penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sesuai dengan standar dan praktik internasional.

Ketentuan tersebut semakin diperjelas dengan aturan yang terdapat pada Bab V Surat Edaran PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut PBI tentang PTP) yaitu, transaksi pembayaran yang wajib diproses secara domestik adalah transaksi pembayaran yang:

- 1) Menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia atau merupakan layanan pembayaran yang disediakan oleh penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan
- 2) Dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelesaian pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik juga wajib dilakukan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran baru, seperti penyelenggara *payment gateway*, lembaga *switching*, serta penyelenggara dompet elektronik⁹⁴ yang diterbitkan di Indonesia maupun pihak asing yang menyelenggarakan sistem pembayaran di Indonesia. Dengan diberlakukannya GPN, maka seluruh transaksi yang dilakukan di Indonesia harus diproses secara domestik dengan terhubung GPN. Agar dapat terhubung dengan GPN, penerbit uang elektronik harus terlebih dahulu menjadi anggota pada lembaga *switching* domestik sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) PBI tentang GPN, yaitu

⁹⁴Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

“Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) lembaga *switching*.”⁹⁵

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang terhubung dengan GPN adalah penerbit, *acquirer*, dan penyelenggara *payment gateway*.⁹⁶ Dimana agar terhubung dengan GPN, pihak-pihak tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota dari minimal 2 (dua) lembaga *switching* domestik yang telah bekerjasama dengan GPN. Kewajiban terhubung dengan paling sedikit 2 (dua) lembaga *switching* berlaku untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.⁹⁷ Ada 4 (empat) lembaga *switching* domestik yang telah memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia yaitu PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (Bersama), PT. Rintis Sejahtera (Prima), PT. Daya Network Lestari (Alto), PT. Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).⁹⁸

Tabel 1.2

**Analisis Pengaturan Penggunaan QR Code Dalam Transaksi Pembayaran
Oleh Bank**

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Analisis
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia	Sistem pembayaran saat ini telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern dan perkembangan teknologi, sebagai otoritas sistem pembayaran misi Bank Indonesia yaitu mengelola dan memelihara sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6

⁹⁵Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG)

⁹⁶Pasal 5 ayat (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

⁹⁷Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional

⁹⁸Galvan Yudistira, 2017, **Empat Lembaga Switching Resmi Dapat Lisensi GPN**, <https://keuangan.kontan.co.id/news/empat-lembaga-switching-resmi-dapat-lisensi-gpn> (diakses pada 17 Maret 2018)

		<p>Undang-Undang tentang Bank Indonesia:</p> <p>“Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”⁹⁹</p> <p>Sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁰⁰ Sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar sangat diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana terutama pada sistem pembayaran ritel. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, diperlukan perangkat hukum yang mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan terkait sistem pembayaran. Perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.</p> <p>Perkembangan teknologi menuntut masyarakat untuk terus mengikuti perkembangannya, begitu pula pada bidang finansial. Saat ini kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran berfokus pada 3 (tiga) besaran strategi yang dilakukan secara simultan, yaitu:¹⁰¹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran ritel domestik di bawah payung GPN 2. Memperluas program elektronifikasi 3. Merespon akselerasi ekonomi digital, khususnya teknologi finansial (tekfin) secara berimbang.
--	--	---

⁹⁹Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

¹⁰⁰Aulia Pohan, 2011, **Sistem Pembayaran**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 72

¹⁰¹Bank Indonesia, 2017, **Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, Bab 9 (diakses pada 28 Januari 2019)

		<p>Strategi tersebut merupakan upaya untuk mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi non tunai, mengubah sebagian besar mekanisme pembayaran dari fisik menjadi digital, atau dari manual menjadi digital, dan meningkatkan akses keuangan yang terbatas menjadi lebih luas (inklusi).¹⁰²Adanya GPN bertujuan untuk mendorong interkoneksi kanal pembayaran yaitu keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lain. Sedangkan interoperabilitas kanal pembayaran yaitu dapat saling dioperasikan, maksudnya satu instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain infrastruktur yang disediakan oleh penerbit untuk pembayaran non tunai ritel nasional yang wajib diselesaikan di dalam negeri melalui GPN. Bank Indonesia terus mendorong program elektronifikasi sebagai perwujudan GNNT guna meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai oleh masyarakat. Bank Indonesia memperkuat program elektronifikasi melalui penggunaan instrumen pembayaran elektronik pada sektor transportasi dan bantuan sosial bagi masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan perbankan. Bank Indonesia merespon perkembangan tekfin secara hati-hati dan berimbang. Menguatnya peran tekfin tercermin pada meningkatnya penggunaan uang elektronik sebagai layanan pembayaran tekfin dan <i>e-commerce</i>. Inovasi tekfin memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Tekfin memberikan akses layanan yang mudah, cepat, dan murah sehingga diyakini mampu mendorong inklusi keuangan.¹⁰³ Bank Indonesia mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu:</p>
--	--	--

¹⁰²Faisal Piliang, 2018, **Evaluasi Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik Dalam Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai**, https://www.academia.edu/28442409/EVALUASI_SISTEM_PEMBAYARAN_BERBASIS_ELEKTRONIK_DALAM_MENDUKUNG_GERAKAN_NASIONAL_NON_TUNAI (diakses pada 24 Januari 2019)

¹⁰³Bank Indonesia, **Bab 9 Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, hlm. 165

		<p>Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:¹⁰⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengatur dan mengawasi bank <p>Berdasarkan tugas-tugasnya menunjukkan bahwa BI mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.¹⁰⁵ Terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank telah dialihkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan pengalihan tugas tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya pertentangan dalam menjalankan tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan bank.¹⁰⁶ Oleh karena itu, kewenangan BI dalam mengawasi keuangan lembaga perbankan dan lembaga non bank saat ini beralih kepada OJK. Tetapi, tugas menjaga stabilitas moneter¹⁰⁷ dan kelancaran sistem pembayaran tetap menjadi tugas BI, dimana tujuan utamanya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Agar tujuan BI dapat tercapai maka perlu didukung oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, dan sistem perbankan dan keuangan yang sehat.¹⁰⁸</p> <p>Adanya kebijakan GPN dalam sistem</p>
--	--	--

¹⁰⁴Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

¹⁰⁵Abdul Rasyid, 2016, **Tugas dan Wewenang Antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Keuangan**, <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/30/tugas-dan-wewenang-antara-bank-indonesia-dengan-otoritas-jasa-keuangan-tehadap-sektor-keuangan-bagian-1-dari-2-tulisan/> (diakses pada 28 Februari 2019)

¹⁰⁶Dhe Marwathi, 2012, **Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment and Authority of The Financial Services Authority)**, https://www.academia.edu/3217150/PEMBENTUKAN_DAN_KEWENANGAN_OTORITAS_JASA_KEUANGAN_ESTABLISHMENT_AND_AUTHORITY_OF_THE_FINANCIAL_SERVICES_AUTHORITY (diakses pada 28 Februari 2019)

¹⁰⁷Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter adalah berhubungan dengan uang dan keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah yang dapat dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan/atau suku bunga (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Bank Indonesia)

¹⁰⁸*Ibid*,

		<p>pembayaran di Indonesia mendukung Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter, karena dengan adanya GPN diharapkan masyarakat semakin banyak bertransaksi menggunakan instrumen non tunai sehingga dapat mengurangi peredaran uang di Indonesia guna memelihara kestabilan nilai rupiah. Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut:¹⁰⁹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. <p>Bank Indonesia terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan pada sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi pembayaran. Dalam menjalankan kewenangannya, Bank Indonesia harus memastikan bahwa jasa sistem pembayaran yang digunakan memenuhi persyaratan tentang keamanan dan efisien bagi penggunaannya. Keamanan dalam sistem pembayaran bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan berbagai alternatif instrumen pembayaran.</p> <p>Guna meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang disebut dengan uang elektronik (<i>e-money</i>).¹¹⁰ Perkembangan uang elektronik (<i>e-money</i>) di Indonesia tidak hanya dalam bentuk kartu tetapi juga berbasis <i>server</i> yang tersimpan dalam <i>smartphones</i> seperti uang elektronik berbasis</p>
--	--	--

¹⁰⁹Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7

¹¹⁰Mintarsih, 2013, **Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money)**, Jurnal Wawasan Hukum, hlm 896

		<p><i>QR Code</i>. Uang elektronik berbasis <i>QR Code</i> telah banyak digunakan oleh negara-negara lain karena penggunaannya yang dianggap lebih cepat, mudah, dan efisien. Berdasarkan konsep keuangan, penggunaan uang elektronik berbasis <i>QR Code</i> telah memenuhi syarat sebagai benda yang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran, seperti mudah dibawa, mudah disimpan, tahan lama, dan diakui.¹¹¹</p>
2.	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Perkembangan teknologi dan informasi ternyata membawa pengaruh bagi pengembangan instrumen pembayaran dalam sistem pembayaran non tunai. Awalnya sistem pembayaran dalam transaksi keuangan hanya menggunakan sarana pembayaran tunai kemudian berkembang dengan menggunakan sarana pembayaran non tunai yang lebih inovatif sehingga menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Adanya teknologi baru yang saat ini sedang berkembang memungkinkan pelaksanaan pembayaran melalui internet. Beberapa metode pembayaran melalui internet akan menghubungkan sistem perbankan elektronik dan sistem pembayaran elektronik melalui internet, termasuk juga jaringan kartu kredit dan kartu debit, serta uang elektronik yang didasarkan pada nilai-nilai yang tersimpan, <i>smart card</i>, atau teknologi lainnya.¹¹²</p> <p>Instrumen pembayaran non tunai yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah pembayaran elektronik melalui <i>smartphone</i>, hal ini dikarenakan semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen pembayaran oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹¹³ Keterkaitan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Uang Elektronik adalah pada lingkup Transaksi</p>

¹¹¹Solikin Suseno, 2002, **Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian**, Seri Kebansentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, hlm. 4

¹¹²Budi Agus Riswandi, 2003, **Hukum dan Internet di Indonesia**, Yogyakarta, UII Press, hlm 23

¹¹³Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, 2003, **Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia**, Jakarta, Studi Pusat Kebanksentralan, Bank Indonesia, hlm 35

		<p>Elektronik. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:</p> <p>“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan <i>computer</i>, jaringan <i>computer</i>, dan/atau media elektronik lainnya.”¹¹⁴</p> <p>Jadi transaksi elektronik dalam sistem pembayaran terjadi pada saat pengguna melakukan kegiatan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik, sehingga perlu dilakukan kegiatan transfer dana dengan menggunakan media elektronik. Dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik berbasis <i>QR Code</i>, pengguna hanya perlu memindai Kode <i>QR</i> yang telah disediakan oleh <i>merchant</i> melalui <i>smartphone</i> milik pengguna.</p>
3.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.</p>	<p>Pada umumnya Uang Elektronik digunakan untuk transaksi keuangan yang bernilai kecil pada <i>merchant-merchant</i> tertentu yang telah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik. Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dilakukan dengan pemindahan dana secara elektronik pada pedagang (<i>merchant</i>), sehingga secara otomatis nilai uang elektronik akan berkurang ketika melakukan transaksi pembayaran. Sampai saat ini uang elektronik terus mengalami perkembangan. Pada awalnya uang elektronik masuk di Indonesia hanya dalam bentuk <i>chip-based</i> (kartu). Seiring perkembangannya uang elektronik tidak hanya tersedia dalam bentuk kartu tetapi juga tersedia dalam bentuk server yang tersimpan pada <i>smartphone</i>.</p> <p>Uang elektronik merupakan uang tunai yang dikonversikan menjadi data elektronik yang disimpan pada media elektronik berupa <i>server</i> atau <i>chip</i>. Sehingga terdapat 2 (dua) tipe uang elektronik yang beredar di Indonesia, yaitu berupa kartu pembayaran</p>

¹¹⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

		<p>(<i>chip-based</i>) dan uang digital (<i>server-based</i>). Perbedaan mendasar diantara keduanya adalah pada mekanisme pemindahan dananya, pada uang elektronik <i>chip based</i> dapat diakses secara <i>offline</i> yang dilakukan dengan memasukkan atau menempelkan kartu ke dalam suatu alat pembaca kartu. Sedangkan pemindahan dana pada uang elektronik <i>server based</i> dapat diakses secara <i>online</i> yang dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi (<i>smartphone</i>) pada saat melakukan pembayaran dengan berbagai macam alat untuk melakukan pembayaran seperti <i>QR Code</i> atau alat komunikasi jarak dekat (<i>Near Field Communication</i>).¹¹⁵</p> <p>Sistem pembayaran non tunai yang saat ini banyak digunakan yaitu uang elektronik berbasis <i>QR Code</i>. <i>QR Code</i> adalah suatu simbol yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh alat <i>scanner</i> ketika melakukan transaksi pembayaran. Penggunaan <i>QR Code</i> sebagai alat transaksi pembayaran telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mengatur bahwa:¹¹⁶</p> <p>(1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.</p> <p>(2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja samadengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 2</p>
--	--	--

¹¹⁵Iwan Krisnadi, 2018, **Regulasi Terkait Pembayaran Elektronik di Indonesia**, [https://www.academia.edu/37130138/REGULASI TERKAIT PEMBAYARAN ELEKTRONIK DI INDONESIA](https://www.academia.edu/37130138/REGULASI_TERKAIT_PEMBAYARAN_ELEKTRONIK_DI_INDONESIA), Universitas Mercu Buana, Jakarta (diakses pada 25 Januari 2019)

¹¹⁶Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

		(dua) kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran agar uang elektronik yang diterbitkan oleh negara lain dapat ditransaksikan di Indonesia. Pertama, wajib menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN. Kedua, Bank Indonesia mewajibkan penyedia jasa layanan uang elektronik atau sistem pembayaran yang melakukan transaksi lintas batas untuk bekerjasama dengan Bank kategori BUKU IV yang terhubung GPN. ¹¹⁷
4.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	Keberadaan uang elektronik sejalan dengan program Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan sejak tahun 2014. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga akan terbentuk masyarakat yang dominan menggunakan instrumen non tunai (<i>cashless society</i>). Program <i>cashless society</i> tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan layanan keuangan yang inklusif kepada masyarakat. Keuangan inklusif merupakan ketersediaan akses layanan keuangan dan produk perbankan terhadap masyarakat yang tergolong belum dijangkau oleh layanan perbankan (<i>unbanked</i>). ¹¹⁸ Dalam membentuk <i>cashless society</i> tetap harus memperhatikan efisiensi alat pembayaran sehingga aman untuk digunakan. Upaya peningkatan efisiensi dalam sistem pembayaran dapat dilakukan melalui interkoneksi sistem pembayaran agar dapat melakukan <i>sharing</i> dalam pengembangan infrastruktur untuk menciptakan efisiensi secara nasional, baik bagi industri sistem pembayaran maupun bagi pengguna karena tidak perlu memiliki

¹¹⁷Hari Widowati, 2018, **BI Perketat Pengawasan Transaksi Uang Elektronik Lintas Batas**, <https://katadata.co.id/berita/2018/05/07/bi-perketat-pengawasan-transaksi-uang-elektronik-lintas-batas> (diakses pada 26 Januari 2019)

¹¹⁸B Kusakristie, 2016, **BAB II Telaah Pustaka Cashless Society**, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8551/2/T2_912014021_BAB%20II.pdf (diakses pada 15 Februari 2019)

	<p>banyak instrumen pembayaran untuk melakukan berbagai transaksi.¹¹⁹ Hal tersebut diwujudkan melalui kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN merupakan sistem pembayaran jaringan domestik yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.¹²⁰ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG) mengatur mengenai ruang lingkup GPN yaitu:</p> <p>Ruang lingkup GPN (NPG) mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi:¹²¹</p> <ol style="list-style-type: none"> Interkoneksi <i>switching</i> Interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa ATM, <i>electronic data captured (EDC)</i>, agen, payment gateway, dan kanal pembayaran lainnya; dan Interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya. <p>Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar <i>switching</i> dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional.¹²² Implementasi GPN dilakukan secara bertahap, pada tahap awal diterapkan pada ekosistem kartu ATM/debit dan uang elektronik <i>chip-based</i>. Sehingga berbagai</p>
--	--

¹¹⁹Nastiti Ninda Lintangari, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, dkk, 2018, **Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia**, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/18772/13125. (Diakses pada 12 Februari 2019)

¹²⁰Pilih Kartu, 2018, **Pengertian dan Kegunaan Gerbang Pembayaran Nasional**, <https://pilihkartu.com/tips-kartu-kredit/pengertian-dan-kegunaan-gerbang-pembayaran-nasional> (diakses pada 27 Januari 2019)

¹²¹Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional

¹²²Agusman, 2017, **Bank Indonesia Meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional**, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199071.aspx, (diakses pada 27 Januari 2019)

		<p>macam kartu debit dan uang elektronik berbentuk kartu dapat ditransaksikan pada kanal pembayaran yang sama. GPN merupakan terobosan dalam mendorong efisiensi nasional, khususnya pada pembayaran ritel. Kanal pembayaran akan terhubung dan dapat digunakan oleh penyelenggara jasa secara bersama-sama sehingga secara operasional menjadi lebih efisien dengan pemanfaatan infrastruktur yang lebih optimal. Desain GPN memungkinkan pemrosesan transaksi pembayaran ritel seperti kartu ATM/kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik dapat dilakukan baik melalui kanal pembayaran elektronik seperti mesin EDC dan mesin ATM maupun melalui internet (<i>online</i>).¹²³ Melihat perkembangan teknologi dan penggunaannya oleh masyarakat, seharusnya program GPN saat ini sudah dapat diberlakukan pada ekosistem uang elektronik <i>server-based</i> mengingat banyaknya masyarakat terutama kalangan anak muda yang lebih tertarik untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik <i>server-based</i> yang dapat diakses melalui <i>smartphone</i>, salah satunya uang elektronik berbasis <i>QR Code</i> karena penggunaannya yang lebih mudah dan cepat. Banyaknya pengguna uang elektronik berbasis <i>QR Code</i> tersebut dapat dimanfaatkan untuk efektivitas program GPN, karena seluruh transaksi yang dilakukan di Indonesia (domestik) wajib diselesaikan melalui GPN.¹²⁴ Jika dikorelasikan dengan tujuan moneter, pemberlakuan GPN diharapkan dapat mengurangi peredaran uang di Indonesia guna memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Semua transaksi yang dilakukan di Indonesia wajib diproses secara domestik melalui GPN, termasuk pula transaksi yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan</p>
--	--	--

¹²³Bank Indonesia, 2017, **Bab 9 Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, Laporan Perekonomian Indonesia, hlm 161

¹²⁴Transaksi domestik merupakan transaksi yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan di dalam negeri

		<p>instrumen yang diterbitkan negara lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PBI tentang GPN mengatur bahwa:</p> <p>“Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) lembaga <i>switching</i>”.¹²⁵</p> <p>Adanya peraturan tersebut mewajibkan bagi pihak yang terhubung dengan GPN yaitu penerbit, <i>acquirer</i>, penyelenggara <i>payment gateway</i>, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia¹²⁶ untuk dapat terhubung dengan GPN wajib terlebih dahulu menjadi anggota pada minimal 2 lembaga <i>switching</i> domestik untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua instrumen pembayaran yang ditransaksikan di Indonesia, termasuk pula bagi penerbit uang elektronik berbasis <i>QRCode</i> yang berasal dari luar wilayah negara Indonesia agar uang elektroniknya dapat ditransaksikan di Indonesia harus menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga <i>switching</i> yang telah memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia.</p>
5.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	<p>Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang telah merambah bidang keuangan patut dipertimbangkan, karena mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tetap harus mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, dan efisien. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan sistem pembayaran, sehingga harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran baru, baik berupa penyelenggara <i>payment</i></p>

¹²⁵Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG)

¹²⁶Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG)

		<p><i>gateway</i>, penyelenggara <i>switching</i>, maupun penyelenggara dompet elektronik.¹²⁷ Berdasarkan Pasal 3 PBI tentang PPTP mengatur bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terdiri atas:¹²⁸</p> <ol style="list-style-type: none"> Prinsipal Penyelenggara <i>switching</i> Penerbit Acquirer Penyelenggara Payment Gateway Penyelenggara Kliring Penyelenggara Penyelesaian Akhir Penyelenggara Transfer Dana Penyelenggara Dompet Elektronik Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia <p>Dalam hal ini, penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dimaksud adalah penyelenggara dompet elektronik karena merujuk pada uang elektronik <i>server-based</i> yang dapat diakses hanya menggunakan <i>smartphone</i> tanpa perlu membawa kartu. Dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dompet elektronik pihak-pihak yang terhubung adalah penerbit, lembaga <i>switching</i>, dan <i>merchant</i> yang telah bekerjasama dengan penerbit. Dimana penerbit uang elektronik sebagai pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk mengakses uang elektronik ketika akan melakukan pembayaran pada <i>merchant</i>. Dalam pemindahan dana dari pengguna uang elektronik kepada <i>merchant</i> dilakukan oleh lembaga <i>switching</i>, dimana lembaga <i>switching</i> tersebut difasilitasi oleh prinsipal. Bagi pihak asing yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran di wilayah negara Indonesia diatur dalam Pasal 16 PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran mengatur bahwa:</p> <p>“Pihak asing yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran di wilayah Negara</p>
--	--	--

¹²⁷Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

¹²⁸Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

		<p>Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹²⁹</p> <p>Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan di Indonesia perlu dilakukan secara domestik untuk meningkatkan kemandirian penyelenggara jasa sistem pembayaran domestik dalam rangka mendukung perluasan penggunaan instrumen non tunai.¹³⁰ Dengan diberlakukannya GPN, secara otomatis mewajibkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dilakukan di Indonesia untuk diproses melalui GPN. Hal ini juga berlaku bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran uang elektronik berbasis <i>QRCode</i> yang diterbitkan diluar wilayah Indonesia untuk dapat ditransaksikan di Indonesia wajib terhubung GPN guna mendukung kebijakan nasional agar pertumbuhan industri jasa sistem pembayaran tidak menghambat pemberlakuan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia, dan otoritas terkait.¹³¹</p>
6.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	<p>Surat Edaran Bank Indonesia diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dimana salah satunya mengatur kewajiban bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dilakukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik. Transaksi pembayaran yang wajib diproses secara domestik adalah transaksi pembayaran yang:¹³²</p>

¹²⁹Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

¹³⁰Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

¹³¹Bank Indonesia, **Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, *Op Cit.*

¹³²Bab V tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran Secara Domestik huruf B Surat Edaran Bank Indonesia Nomor tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia atau merupakan layanan pembayaran yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 2. Dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <p>Berlakunya GPN dan adanya ketentuan tersebut mewajibkan untuk semua transaksi pembayaran yang dilakukan di Indonesia untuk diproses secara domestik dengan menggunakan GPN. Dalam aturan dan mekanisme GPN ditentukan bahwa seluruh instrumen pembayaran yang diterbitkan di domestik oleh penerbit domestik, wajib dilakukan dengan pemrosesan domestik pula.¹³³ Ketentuan itu juga berlaku bagi sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>“Untuk penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi uang elektronik dan/atau transaksi sistem pembayaran lainnya, tunduk pada ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.”¹³⁴</p> <p>Bagi uang elektronik yang ditransaksikan di wilayah Indonesia harus diproses secara domestik. Dengan berlakunya GPN mengakibatkan seluruh pembayaran yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan menggunakan GPN, termasuk juga uang elektronik berbasis <i>QR Code</i> yang diterbitkan oleh negara asing dan dapat ditransaksikan di Indonesia wajib diproses secara domestik melalui GPN.</p>
7.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas utama yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Saat ini OJK memiliki 10 (sepuluh) kebijakan utama, salah satunya

¹³³Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional

¹³⁴Bab V tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran Secara Domestik huruf D poin b Surat Edaran Bank Indonesia Nomor tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

	Sektor Jasa Keuangan	<p>yaitu mengembangkan sistem jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (<i>ITBasedSupervision</i>) serta mengoptimalkan peran <i>Financial Technology</i>(<i>Fintech</i>) melalui pengaturan, perizinan, dan pengawasan yang memadai.¹³⁵ Oleh karena itu OJK membentuk POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Sistem pembayaran non tunai merupakan bagian dari Inovasi Keuangan Digital (IKD) yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.¹³⁶ IKD berperan penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, dan luas sehingga dapat menjangkau daerah terpencil¹³⁷ karena salah satu kriteria IKD yaitu mendukung inklusi dan literasi keuangan.¹³⁸ Dimana kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan kemudahan akses produk finansial. Kebijakan tersebut juga bertujuan agar masyarakat dapat melihat uang dari sudut pandang yang berbeda dan dapat mengatur kondisi keuangannya.</p> <p>Dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan dapat dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan layanan jasa perbankan. Namun, melihat kondisi saat ini dimana penetrasi <i>smartphone</i> yang telah melampaui kepemilikan akun bank di kalangan masyarakat,¹³⁹ salah satunya</p>
--	----------------------	---

¹³⁵Firdaus Baderi, 2017, **BI Diminta Transparan Soal E-money – OJK Terbitkan 10 Kebijakan Terkait IT**, <http://www.neraca.co.id/article/91285/bi-diminta-transparan-soal-e-money-ojk-terbitkan-10-kebijakan-utama-terkait-it> (diakses pada 17 Februari 2019)

¹³⁶Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

¹³⁷Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

¹³⁸Pasal 4 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

¹³⁹Joshua Agusta, 2018, **Mobile Payments in Indonesia: Race to Big Data Domination**, <https://medium.com/@joshuaagusta/mobile-payments-in-indonesia-race-to-big-data-domination-e1fb23211fc4> (diakses pada 6 Februari 2019)

		<p>penggunaan uang elektornik berbasis <i>QR Code</i> dapat dimanfaatkan untuk mendukung inklusi dan literasi keuangan melalui pendekatan aplikasi. Kondisi ini juga semakin didukung dengan pemberlakuan GPN dimana seluruh pembayaran yang terjadi di Indonesia harus diproses secara domestik karena Bank Indonesia tidak ingin pendapatan dari transaksi elektronik di Indonesia beralih ke perusahaan prinsipal asing seperti Visa dan Mastercard.</p>
8.	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum</p>	<p>Keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana efisien, aman, dan handal dapat mempermudah para pelaku ekonomi untuk melakukan akses terhadap berbagai keperluan pembayaran dan sebaliknya jika sistem pembayaran mengalami gangguan, maka yang terkena dampaknya adalah sistem pembayaran secara menyeluruh.¹⁴⁰ Peran teknologi informasi menjadi aspek penting mengingat semakin tingginya penggunaan teknologi dan komputer sebagai media transaksi keuangan. Hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya penggunaan jaringan internet disertai dengan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet.¹⁴¹ Dalam mendukung kebijakan <i>cashless society</i>, Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia telah banyak memberikan izin kepada lembaga perbankan untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran berbasis elektronik. Layanan Perbankan Elektronik merupakan layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.¹⁴² Sedangkan Layanan Perbankan Digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka</p>

¹⁴⁰Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Op Cit*, hlm 27

¹⁴¹Penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

¹⁴²Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

		<p>melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (<i>customer experience</i>), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan.¹⁴³</p> <p>Penyelenggaraan layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan digital sebagai upaya bank dalam rangka memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa:</p> <p>Layanan perbankan digital yang disediakan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa:¹⁴⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi rekening Otorisasi transaksi Pengelolaan keuangan, dan/atau Pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan <p>Dalam hal otorisasi transaksi dapat mencakup transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Salah satu contoh otorisasi transaksi yaitu ketika akan melakukan transaksi pembayaran menggunakan instrumen pembayaran non tunai, nasabah sebagai pengguna jasa sistem pembayaran membutuhkan <i>smartphone</i> yang dilengkapi dengan teknologi dan aplikasi pendukung penggunaan <i>QR Code</i>. Ketika melakukan transaksi pada <i>merchant</i> yang telah bekerjasama dengan bank sebagai penerbit, maka nasabah hanya perlu memindai <i>QR Code</i> yang telah disediakan oleh <i>merchant</i> untuk pendebitan secara otomatis sesuai dengan nominal transaksi.</p>
--	--	--

2. Implikasi Yuridis Penggunaan *QRCode* dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank dengan Menggunakan Kanal Pembayaran yang Terhubung dengan *Switching* Asing

¹⁴³Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

¹⁴⁴Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

Penggunaan instrumen pembayaran non tunai terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa instrumen pembayaran non tunai sudah diterima oleh masyarakat sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik berbasis *QR Code* merupakan alternatif alat pembayaran non tunai yang digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro dan ritel. Dengan memanfaatkan teknologi, *software*, internet, dan komunikasi membuat uang elektronik semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena bertransaksi menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat mengurangi penggunaan uang tunai.

Pemberlakuan GPN diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran. Namun, dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh GPN, pada kenyataannya pemberlakuan GPN masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu untuk saat ini GPN belum bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri, GPN hanya bisa digunakan untuk transaksi domestik. Sehingga bagi masyarakat Indonesia yang telah terhubung GPN dan sering bertransaksi di luar negeri perlu menyediakan 2 (dua) alat pembayaran non tunai, dimana satu alat pembayaran yang terhubung dengan GPN untuk transaksi domestik dan satunya lagi alat pembayaran non tunai yang terhubung dengan *switching* seperti Visa dan Mastercard untuk transaksi yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat Indonesia enggan untuk mengubah instrumen pembayarannya dari Visa dan Mastercard menjadi GPN. Hingga saat ini penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang beredar di Indonesia mencapai 160 juta dan lebih dari 80% berlogo Visa dan Mastercard.¹⁴⁵

¹⁴⁵*Ibid*,

Kekurangannya yang kedua adalah implementasi GPN saat ini masih berada pada tahap awal yang diterapkan pada ekosistem kartu debit dan uang elektronik *chip-based*. Melihat perkembangan media elektronik dan banyaknya masyarakat yang lebih berminat untuk menggunakan uang elektronik *server-based* khususnya *QR Code*, seharusnya dapat dimungkinkan penerapan GPN pada ekosistem uang elektronik berbasis *QR Code* karena meningkatnya penggunaan *smartphone* di Indonesia yang mengarah pada tren pembayaran besar yaitu penggunaan *mobile payment*. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk efisiensi implementasi GPN sehingga dapat membantu Bank Indonesia untuk mewujudkan program inklusi keuangan agar masyarakat dapat menikmati layanan perbankan secara menyeluruh melalui pendekatan berbasis aplikasi, karena tingginya jumlah pengguna *smartphone* yang terhubung ke internet, yaitu sebesar 70% dari 143,2 juta penduduk Indonesia.¹⁴⁶

Penggunaan uang elektronik berbasis *QR Code* di Indonesia semakin lumrah digunakan. Salah satu lembaga perbankan yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran berbasis *QR Code* adalah Bank BNI melalui aplikasi yap!. Yap! merupakan suatu aplikasi berbasis *QR Code* yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, dimana sumber dana dari aplikasi yap! dapat berasal dari kartu debit, kartu kredit, dan UnikQu. Aplikasi yap! semakin mengembangkan sistemnya dengan melakukan kerjasama terintegrasi dengan *e-wallet* yang berasal dari Singapura yaitu Liquidpay dimana sumber dana aplikasi Liquidpay berasal dari kartu kredit yang terhubung dengan Visa dan Mastercard. Sehingga aplikasi LiquidPay dapat

¹⁴⁶Tanayastrini Dini Isna, 2018, **BI: Peluang Pembayaran QR Code di Indonesia Besar**, <https://www.wartaekonomi.co.id/read207567/bi-peluang-pembayaran-kode-qr-di-indonesia-besar.html> (diakses pada 14 Februari 2019)

diakses dengan memindai QRIS pada *merchant* yang telah bekerjasama dengan yap! milik Bank BNI.

Terhubungnya GPN pada aplikasi yap! tergantung pada jenis sumber dana yang digunakan oleh penggunanya, apakah telah terhubung dengan GPN atau masih terhubung dengan Visa dan Mastercard. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) PBI tentang Uang Elektronik yang mewajibkan bagi uang elektronik yang diterbitkan oleh negara lain hanya dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN. Untuk dapat terhubung dengan GPN, pihak yang terhubung GPN diantaranya yaitu penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib terlebih dahulu menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga *switching* yang telah memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia. Jadi, aplikasi Liquidpay dapat ditransaksikan di Indonesia apabila penerbit Liquidpay tersebut terhubung dengan GPN dengan cara menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga *switching* domestik. Dalam integrasi tersebut sumber dana yang digunakan oleh aplikasi Liquidpay berasal dari kartu kredit yang terhubung dengan Visa dan Mastercard. Hal ini dikarenakan pengimplementasian GPN yang masih berada pada tahap awal yaitu pada ekosistem kartu debit dan uang elektronik *chip-based*, sedangkan aplikasi Liquidpay merupakan uang elektronik berbasis *QR Code*. Tetapi, implementasi GPN pada uang elektronik *server-based* dimungkinkan dalam waktu dekat sehingga mendorong penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk mulai mempersiapkan sistemnya untuk terhubung dengan GPN. Dalam Pasal 39 ayat (2) juga mengatur

mengenai kewajiban bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran asing untuk bekerjasama dengan Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan terhubung GPN. Dalam hal ini Liquidpay telah bekerjasama dengan Bank kategori BUKU 4 yaitu Bank BNI meskipun Bank BNI tidak hanya terhubung dengan GPN tetapi juga masih melayani instrumen pembayaran yang terhubung dengan Visa dan Mastercard.

Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik transaksi domestik maupun transaksi lintas batas (*crossborder*) dengan menggunakan instrumen pembayaran.¹⁴⁷ Salah satu instrumen pembayaran non tunai yang banyak digunakan adalah uang elektronik berbasis *QR Code*.

Perjanjian yang terjadi dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Liquidpay milik Singapura. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

¹⁴⁷Bank Indonesia, 2004, **Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional**

lebih.¹⁴⁸ Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Terkait dengan keabsahan transaksi/pembayaran elektronik yang terhubung dengan *switching* asing, absah berasal dari kata serapan bahasa inggris yaitu *validity* yang artinya kekuatan hukum, sah menurut hukum.¹⁴⁹ Perjanjian yang terbentuk agar dapat mengikat secara hukum dan mendapatkan perlindungan hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat untuk mereka yang saling mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

Pertama yaitu sepakat, berdasarkan Pasal 1446 hingga Pasal 1450 KUH Perdata, para pihak yang mengadakan perjanjian diwajibkan untuk terdapat kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Atas dasar kata sepakat maka suatu perikatan tidak boleh adanya paksaan dan unsur penipuan. Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar sepakat berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat diajukan pembatalan.¹⁵⁰ Dalam hal ini perjanjian antara Bank BNI melalui aplikasi yap! dengan Liquidpay milik Singapura telah memenuhi syarat adanya kata sepakat antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian sehingga aplikasi Liquidpay dapat ditransaksikan di Indonesia.

Kedua yaitu cakap, menurut hukum orang yang cakap adalah orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran sehat. Undang-Undang mengatur mengenai

¹⁴⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

¹⁴⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 2

¹⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 5

kedewasaan seseorang dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu orang yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah, begitu pula seseorang yang usianya belum genap 21 tahun namun sudah menikah maka orang tersebut dianggap telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat perjanjian.¹⁵¹ KUH Perdata juga mengatur tentang siapa saja pihak yang tidak cakap menurut hukum secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian.¹⁵²

Para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam hal ini adalah Bank BNI dengan pihak Liquidpay Singapura. Kedua pihak tersebut merupakan badan hukum yang dapat dikatakan cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu, suatu hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Syarat ketiga diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa semua perjanjian pasti berkaitan dengan suatu keberadaan atau suatu kebendaan tertentu. Pada perjanjian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan KUH Perdata, hal yang harus dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan

¹⁵¹ J Satrio, 2000, Hukum Perikatan, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

¹⁵² Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, maka perempuan tidak lagi termasuk orang yang tidak cakap hukum

berwujud maupun tidak berwujud.¹⁵³Pasal 1334 KUH Perdata menyebutkan termasuk barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, kecuali objek tersebut dilarang oleh undang-undang.¹⁵⁴Undang-undang tidak mengharuskan suatu barang sudah ada atau belum pada saat perjanjian dilaksanakan, setidaknya objek perjanjian telah ditentukan jenisnya. Objek perjanjian dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam bentuk uang elektronik berbasis *QRCode*.

Keempat, sebab yang halal berkaitan dengan isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1336 KUH Perdata adalah sah dibuat para pihak selama tidak bertentangan dengan sebab-sebab yang dilarang, sebab-sebab yang dimaksud selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1337 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maksud dari pasal ini peraturan perundang-undangan memiliki sifat untuk melindungi kepentingan umum, sehingga jika tidak sesuai dengan kepentingan umum dapat membahayakan kepentingan umum itu sendiri. Suatu sebab yang halal, dalam hal ini terkait dengan isi dari perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Dalam perjanjian kerjasama terintegrasi antara Bank BNI dengan Liquidpay Singapura tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur

¹⁵³Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan, 2005, **Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 156

¹⁵⁴J Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 32

bahwa bagi uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN. Namun, sumber dana dari aplikasi Liquidpay tersebut terhubungnya dengan Visa dan Mastercard. Pemberlakuan GPN merupakan bagian dari program Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi non tunai di Indonesia dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini menyebabkan seluruh transaksi non tunai yang dilakukan di Indonesia wajib terhubung GPN guna mendukung kebijakan nasional agar pertumbuhan industri jasa sistem pembayaran tidak menghambat pemberlakuan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia, dan otoritas terkait.¹⁵⁵

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat subjektif yaitu syarat terkait dengan pihak-pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif terkait dengan objek yang diperjanjikan dan disepakati untuk dilaksanakan sebagai prestasi oleh para pihak.¹⁵⁶ Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak. Namun jika para pihak tidak merasa keberatan maka perjanjian dianggap sah. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

¹⁵⁵Bank Indonesia, **Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**, *Op Cit.*

¹⁵⁶Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2005, **Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 53

Terkait dengan kerjasama terintegrasi antara Bank BNI dengan Liquidpay Singapura tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 ayat (4) mengenai suatu sebab yang halal. Integrasi antara Liquidpay dengan Bank BNI bertentangan dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, sehingga berakibat hukum kerjasama terintegrasi tersebut batal demi hukum. Sehingga, transaksi yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan aplikasi Liquidpay menjadi tidak sah. Apabila dalam penggunaan *e-wallet* Liquidpay di Indonesia terjadi suatu hal yang dapat merugikan baik pengguna maupun penerbit Liquidpay, maka menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Bagi pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini yaitu Bank BNI dan penerbit Liquidpay Singapura untuk dapat terhubung dengan GPN dapat dilakukan dengan cara menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga *switching* domestik yang telah memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia. Namun, ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Liquidpay Singapura sehingga bagi penerbit Liquidpay itu dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN, berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda; dan/atau
- c. Penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG)

Belum diimplementasikannya GPN pada uang elektronik *server-based*, khususnya uang elektronik berbasis *QRCode* menyebabkan kondisi yang kurang kondusif baik bagi masyarakat maupun bagi penerbit. Penerbit harus memelihara sendiri berbagai kanal pembayaran sehingga berdampak pada terbatasnya kapasitas ekspansi dan mengurangi kepastian serta kenyamanan transaksi. Masyarakat sebagai pengguna harus memelihara banyak kartu/akun

untuk kelancaran transaksi dengan biaya administrasi yang mahal. Belum diterapkannya GPN pada seluruh instrumen pembayaran non tunai di Indonesia mengakibatkan skema domestik yang seharusnya mampu memfasilitasi transaksi antarpenerbit di dalam negeri menjadi tidak efisien sehingga harus mengandalkan skema internasional yang berbiaya mahal. Kondisi ini berdampak pada inefisiensi yang menghambat akseptasi sistem pembayaran non tunai dari sisi pedagang maupun masyarakat. Dimana penggunaan instrumen non tunai merupakan bagian dari program GNNT demi terciptanya *cashless society* yang bertujuan untuk mengurangi peredaran uang di Indonesia guna menjaga kestabilan nilai rupiah.

B. Perbandingan Pengaturan Penggunaan QR Code Antara Indonesia dan Singapore

1. Indonesia

Pada akhir tahun 2017 Indonesia baru memberlakukan GPN yaitu sistem yang mengintegrasikan semua instrumen dan kanal pembayaran. GPN digunakan untuk transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pemrosesannya dilakukan di dalam negeri. GPN memiliki tujuan untuk interkoneksi *switching* dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran. Dalam transaksi pembayaran, *switching* adalah infrastruktur yang bertugas sebagai pusat atau penghubung penerusan data transaksi dari pembayaran melalui jaringan pembayaran menggunakan kartu, uang elektronik atau transfer dana. Dengan GPN seluruh infrastruktur yang mendukung sistem pembayaran akan saling terhubung dan interoperabilitas. Sehingga dengan diberlakukannya GPN,

pengguna dapat menggunakan satu infrastruktur untuk mengakses berbagai instrumen pembayaran non tunai. Biaya yang dikenakan ketika bertransaksi menggunakan GPN hanya 1%. Sedangkan menurut data Visa dan Mastercard, masing-masing provider mengenakan biaya transaksi masing-masing 0,80% dan 0,85%. Jika dalam satu instrumen pembayaran terdapat dua logo tersebut maka *fee* yang dikenakan sebesar 1,65%.¹⁵⁷

Implementasi GPN untuk saat ini masih berada pada tahap awal yaitu pada ekosistem kartu debit dan uang elektronik *chip-based*. Namun, melihat perkembangan teknologi saat ini dimungkinkan pemberlakuan GPN pada ekosistem uang elektronik *server-based*. Sama dengan tren sistem pembayaran di Singapura, di Indonesia juga sedang berkembang tren pembayaran melalui teknologi *QR Code*. Penggunaan *QR Code* dalam transaksi pembayaran banyak diminati oleh masyarakat karena dapat memudahkan masyarakat saat melakukan transaksi pembayaran. Dalam penggunaan uang elektronik berbasis *QR Code*, pengguna hanya perlu memindai kode *QR* yang tersedia pada *merchant-merchant* yang telah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik. Penggunaan *QR Code* sebagai alat transaksi pembayaran telah diatur dalam Pasal 39 PBI tentang Uang Elektronik, yaitu:¹⁵⁸

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.
- (2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

¹⁵⁷*Ibid*,

¹⁵⁸Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Bagi uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN dan bekerjasama dengan Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang termasuk kategori BUKU 4 yang terhubung dengan GPN pula. Untuk dapat terhubung dengan GPN penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga *switching* domestik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 PBI tentang Gerbang Pembayaran Nasional, yaitu:

“Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) lembaga *switching*.”¹⁵⁹

Kewajiban untuk terhubung dengan minimal 2 (dua) lembaga *switching* domestik ini berlaku untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.¹⁶⁰ Bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran asing yang tidak terhubung dengan GPN dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 25 PBI tentang GPN, yaitu wajib terhubung GPN dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) lembaga *switching* dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN, berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda; dan/atau
- c. Penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN.

¹⁵⁹Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG)

¹⁶⁰Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional

2. Singapura

Sistem pembayaran merupakan aspek yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.

Berdasarkan *Payment System (Oversight) Act Chapter 222A* mengatur bahwa:

*“payment system” means a funds transfer system or other system that facilitates the circulation of money, and includes any instruments and procedures that relate to the system.*¹⁶¹

Sistem pembayaran merupakan sistem transfer dana atau sistem lain yang memfasilitasi sirkulasi uang, dan termasuk instrumen dan prosedur apapun yang terkait dengan sistem.

Ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian sistem pembayaran yang ada di Indonesia, dimana sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang memfasilitasi perpindahan dana dari satu pihak ke pihak yang lain yang dapat dilakukan melalui berbagai media yang tersedia

*MAS Deputy Managing Director, Ms Jacqueline Loh said, “Payments is one of the key components of FinTech and serves as a foundation for our vision of a Smart Financial Centre. This public consultation is an important step for MAS and the payments industry to co-create the future of Singapore’s payments landscape; one where payments are swift, simple, and secure, supported by streamlined regulation and inclusive governance.”*¹⁶²

Wakil Direktur Pelaksana MAS, Ms Jacqueline Loh mengatakan, “Pembayaran adalah salah satu komponen kunci bagi Fintech dan berfungsi sebagai landasan bagi visi kami tentang *Smart Financial Centre*. Konsultasi publik ini merupakan langkah penting bagi MAS dan industri pembayaran

¹⁶¹ Attorney General’s Chambers (SG), **Payment System (Oversight) Act**, <https://sso.agc.gov.sg/Act/PSOA2006#pr7-> (diakses pada 18 Februari 2019)

¹⁶² Monetary Authority of Singapore, 2016, **MAS Proposes New Regulatory Framework and Governance Model for Payments**, <http://www.mas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20160825010/Media%20Release%20-%20MAS%20Proposes%20New%20Regulatory%20Framework%20and%20Governance%20Model%20for%20Payments%20in%20Singapore.pdf> (diakses pada 18 Februari 2019)

untuk bekerja sama menciptakan masa depan lanskap pembayaran Singapura, dimana pembayarannya cepat, sederhana, dan aman, didukung oleh regulasi yang efisien dan tata kelola yang inklusif.

Singapura dianggap sebagai salah satu pusat Fintech di Asia, dimana penggunaan pembayaran seluler telah meningkat sebesar 53% sejak tahun 2017.¹⁶³ Negara Singapura menganut sistem *common law* berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem *civil law*, sehingga Singapura mengadopsi hukum dari Inggris sesuai dengan negara yang pernah menjajah negara itu.¹⁶⁴ Kegiatan perbankan di Singapura tidak jauh berbeda dengan kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Singapura memiliki bank sentral dan otoritas keuangan Singapura yaitu Monetary Authority Singapore (MAS). MAS memiliki tugas untuk mengelola berbagai undang-undang yang berkaitan dengan uang, perbankan, asuransi, sekuritas dan sektor keuangan secara umum. MAS juga memiliki peran sebagai bank sentral, termasuk kebijakan moneter, penerbitan mata uang, pengawasan sistem pembayaran termasuk pula penggunaan alat pembayaran. MAS telah bermitra dengan industri keuangan untuk menciptakan pusat keuangan yang cerdas, dimana inovasi Fintech menyebar dan dapat digunakan secara luas.

Singapura memiliki program untuk menjadikan masyarakat tanpa uang tunai (*cashless society*) guna menjaga kestabilan moneter Singapura. Pada tahun 1985 penggunaan instrumen pembayaran non tunai semakin didukung

¹⁶³Singapore Business Review, 2018, **Mobile Payment Adoption In Singapore Rise Despite Security Concerns**, <https://sbr.com.sg/building-engineering/news/mobile-payment-adoption-in-singapore-rise-despite-security-concerns> (diakses pada 16 Februari 2019)

¹⁶⁴Jenad, 2013, **Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang negara Indonesia dan Singapura**, <http://repository.uib.ac.id/370/6/S-0851002-chapter%20II.pdf> (diakses pada 13 Februari 2019)

dengan diberlakukannya Network for Electronic Transfer Singapore (NETS) yaitu gerbang sistem pembayaran milik Singapura yang dibentuk oleh konsorsium¹⁶⁵ bank-bank lokal untuk memberikan alternatif pembayaran dan memberikan kemudahan kepada masyarakat Singapura dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Tujuan pembentukan NETS adalah untuk membangun infrastruktur, sistem, dan untuk memfasilitasi layanan elektronik banking dan pembayaran keuangan, salah satunya melalui uang elektronik. Dengan adanya NETS Jika melakukan transaksi menggunakan NETS maka hanya dikenakan *fee* sebesar 0,80% biaya ini tentu lebih murah dibandingkan jika bertransaksi menggunakan kartu berlogo Visa dan Mastercard.¹⁶⁶

NETS beroperasi melalui *ElectronicFundTransfer atPointofSale* (EFTPOS). EFTPOS merupakan suatu sistem yang memungkinkan pengguna untuk membayar barang atau jasa melalui transfer dana *online* melalui akun mereka, jika di Indonesia EFTPOS sama dengan mesin ATM atau mesin EDC. NETS telah berevolusi menjadi organisasi multi layanan yang menyediakan serangkaian pembayaran dan layanan pemrosesan keuangan, seperti NETS untuk pembayaran debit dan kredit, eNETS untuk pembayaran *online*, NETSPay untuk pembayaran seluler, dan lain sebagainya. NETS telah bermitra dengan sistem pembayaran elektronik Malaysia (MEPS), UnionPay di China, serta perdana menteri India juga membuat kesepakatan bahwa KartuRupay dapat diterima di Singapura. Sehingga sistem gerbang

¹⁶⁵Konsorsium merupakan pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan

¹⁶⁶Alfado Agustio, CNBC Indonesia, 2018, **Tak Bergantung Visa dan Mastercard, Negara ini Punya GPN Sendiri**, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180726173248-4-25568/tak-bergantung-visa-master-negara-ini-punya-gpn-sendiri> (diakses pada 13 Februari 2019)

pembayaran NETS dapat digunakan di negara-negara yang telah bermitra dengan NETS.

Syarat bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk terhubung dengan layanan akses perangkat NETS adalah bagi instrumen pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh berbagai bank dan lembaga selain NETS, untuk dapat ditransaksikan melalui perangkat akses NETS pedagang harus mengadakan perjanjian dengan bank dan lembaga yang menerbitkan instrumen pembayaran tersebut dan bank Singapura yang telah berpartisipasi dalam layanan NETS.¹⁶⁷

Bagi instrumen pembayaran non tunai yang terhubung dengan *switching* asing dan ditransaksikan di Singapura pemrosesan transaksinya hanya akan dilakukan dengan menggunakan perangkat akses NETS dan NETS tidak bertanggung jawab atas setiap transaksi yang diproses oleh *merchant* tanpa menggunakan perangkat akses NETS.¹⁶⁸ Para pihak dalam perjanjian ini juga harus sepakat dalam hal terjadi perselisihan atau klaim dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan transaksi apapun, catatan transaksi yang tersedia pada merchant dan NETS akan digunakan sebagai referensi dan menjadi satu-satunya dasar penyelesaian sengketa atau klaim tersebut. Apabila terjadi perbedaan antara catatan transaksi oleh NETS, *merchant* dan *switching* asing, maka yang akan digunakan dan menjadi dasar penyelesaian sengketa atau klaim tersebut adalah catatan-catatan transaksi dari NETS.¹⁶⁹

¹⁶⁷NETS, **Terms and Condition**, <https://www.nets.com.sg/terms-and-conditions/#A8>, diakses pada 09 Mei 2019

¹⁶⁸*Ibid*

¹⁶⁹*Ibid*

NETS tidak bertanggung jawab atas kelalaian, pelanggaran atau kegagalan *switching* asing untuk melakukan pembayaran atau mengirimkan uang kepada *merchant* yang timbul dari adanya transaksi. Namun, jika terjadi kegagalan atau pelanggaran *merchant* berhak untuk segera mengakhiri keterhubungan dengan layanan tersebut dan NETS akan melakukan upaya terbaik untuk membantu *merchant* memulihkan uang dari *switching* asing. Dalam hal pendapatan *merchant* tidak dapat dipulihkan dari *switching* asing, NETS berhak menyerap dana sebesar S\$1.000,00 (seribu dolar Singapura), secara agregat dari kerugian berkelanjutan yang dialami *merchant* sebagai akibat dari pelanggaran atau kegagalan *switching* asing.¹⁷⁰

Sistem pembayaran saat ini berevolusi ke arah pemanfaatan teknologi, *Singapore Payments Council* (SPC) merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah Singapura untuk mengatur transaksi digital.¹⁷¹ Salah satu sistem pembayaran non tunai yang banyak digunakan adalah pembayaran dengan memanfaatkan *QR Code*. Kondisi ini sejalan dengan MAS yang sedang berfokus untuk meningkatkan interoperabilitas pembayaran elektronik, yaitu melalui terminal titik penjualan, kode *QR*, dan kekuatan peraturan.¹⁷² Dewan pembayaran Singapura menyetujui spesifikasi *Singapore Quick Response* (SGQR) yang dapat menerima pembayaran elektronik baik dengan skema domestik, internasional, dompet elektronik, dan bank.¹⁷³ SGQR adalah kode

¹⁷⁰*Ibid*,

¹⁷¹Uday Rayana, 2017, **Singapura Terapkan Standarisasi Pembayaran QR Code Nasional**, <https://selular.id/2017/11/singapura-terapkan-standarisasi-pembayaran-qr-code-nasional/> (diakses pada 14 Februari 2019)

¹⁷²Monetary Authority of Singapore, 2018, **E-payment User Protection Guidelines**, http://www.mas.gov.sg/~media/resource/publications/consult_papers/2018/Epayers%20User%20Protection%20Guidelines.pdf (diakses pada 16 Februari 2019)

¹⁷³Monetary Authority of Singapore, 2017, **Payments Council Endorse Singapore Quick Response Code Specifications for Electronic Payments**, <http://www.mas.gov.sg/News->

QR tunggal yang menggabungkan beberapa solusi pembayaran elektronik menjadi satu, *SGQR* dimaksudkan untuk menyederhanakan pembayaran elektronik di Singapura untuk konsumen dan pedagang,¹⁷⁴ sehingga pedagang hanya perlu satu *QR Code* untuk menerima semua jenis pembayaran elektronik untuk menerima skema pembayaran domestik dan internasional. Uang elektronik berbasis *QR Code* dapat digunakan pada toko yang menyediakan *SGQR* dan dapat diakses melalui *eNETS QR* sebagai metode pembayaran.

Sistem pembayaran domestik sebenarnya bukan satu-satunya yang diterapkan oleh Indonesia melalui *GPN*, banyak negara lain yang memiliki gerbang sistem pembayarannya untuk memproses transaksi domestik, seperti Malaysia dengan *MEPS*, Singapura dengan *NETS*, China dengan *UnionPay*. Indonesia dapat belajar melalui Singapura yang telah lebih dulu memberlakukan sistem pembayaran domestik. Dimana untuk mewujudkan efisiensi sistem gerbang pembayarannya, Singapura melakukan kerjasama dengan *switching* agar alat pembayaran non tunai milik negara Singapura dapat ditransaksikan di negara lain dan dapat menerima transaksi dari negara lain dengan tetap terhubung sistem gerbang pembayaran milik negara Singapura itu sendiri.

Kebijakan ini perlu diterapkan di Indonesia, mengingat kekurangan dari pemberlakuan *GPN* yang belum bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri serta perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat yang

[and-Publications/Media-Releases/2017/Payments-Council-endorses-Singapore-Quick-Response-Code-Specifications-for-electronic-payments.aspx](#) (diakses pada 14 Februari 2019)

¹⁷⁴Monetary Authority of Singapore, 2018, **SGQC – Singapore Quick Response Code**, <http://www.mas.gov.sg/sgqr> (diakses pada 16 Februari 2019)

mengarah pada pemanfaatan instrumen pembayaran non tunai. Kerjasama antara GPN dengan *switching* asing sangat dimungkinkan untuk mendukung efektivitas proses transaksi dengan tetap menguntungkan kepentingan nasional, sebagaimana yang telah banyak dilakukan oleh negara-negara lain agar gerbang sistem pembayaran nasionalnya dapat digunakan untuk transaksi di negara lain dengan tetap terhubung sistem pembayaran negaranya sendiri. Dengan kerjasama yang dilakukan antara GPN dengan *switching* Internasional, nantinya GPN dapat ditransaksikan di negara lain dan dapat menerima transaksi dari negara lain dengan tetap menggunakan sistem GPN.

Terhubungnya GPN dengan *switching* asing akan memberikan banyak keuntungan baik bagi Bank Indonesia maupun bagi penggunanya. *Switching* asing akan menularkan teknologi ke *switching* lokal, karena *switching* asing lebih berpengalaman sehingga dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan keamanan *switching* lokal.¹⁷⁵ Dapat menjadi potensi pendapatan untuk perusahaan nasional yang sebelumnya hanya bergantung pada perusahaan *switching* asing. Pemberlakuan GPN juga diharapkan dapat mengurangi peredaran uang di Indonesia serta dapat meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran non tunai melalui interkoneksi lembaga *switching* dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran, sehingga dapat menekan *capital expenditure* atau belanja modal

¹⁷⁵Surya Rianto, 2017, **Gerbang Pembayaran Nasional: Asing Tergiur Untuk Berkongsi**, <https://banten.bisnis.com/read/20171214/446/718174/gerbang-pembayaran-nasional-asing-tergiur-untuk-berkongsi> (diakses pada 17 Februari 2019)

untuk infrastruktur oleh lembaga perbankan,¹⁷⁶ karena satu infrastruktur dapat digunakan oleh selain instrumen pembayaran dari penerbit.



¹⁷⁶Sylke Febrina Laucereno, 2017, **GPN, Sistem yang Bakal Bikin Biaya Transfer Antar Bank Lebih Murah**, <https://m.detik.com/finance/moneter> (diakses pada 7 Januari 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat kesimpulan bahwa implikasi yuridis penggunaan uang elektronik berbasis *QRCode* dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan *switching* asing terhadap syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik bahwa, uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN. Sehingga pada perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum atau perjanjian tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Sehingga bagi uang elektronik asing yang ditransaksikan di Indonesia dengan tidak terhubung GPN apabila terjadi suatu hal yang dapat merugikan para pihak yang melakukan perjanjian menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Bagi pihak asing yang melakukan kerjasama dengan Bank dalam negeri dengan tidak terhubung GPN, yang wajib dilakukan dengan cara menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga *switching* domestik yang telah memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka penerbit uang elektronik tersebut dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 42 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda; dan/atau
- c. Pengehentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG)

B. Saran

1. Bagi Bank Indonesia

Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi menggunakan uang elektronik *server-based* menjadi peluang efisiensi pemberlakuan GPN, sehingga perlu adanya interkoneksi lembaga *switching* dan interoperabilitas instrumen pembayaran yang dapat dilakukan dengan implementasi GPN pada ekosistem uang elektronik *server-based*. Bank Indonesia juga perlu mempromosikan penerapan standar internasional dan bekerjasama dengan mitra industri sistem pembayaran asing untuk mengatasi tantangan hubungan transaksi lintas batas (*cross-bordere*).

2. Bagi Para Pelaku Bisnis (*merchant*)

Para pelaku bisnis khususnya *merchant-merchant* yang belum menggunakan alat pembayaran non tunai khususnya uang elektronik, untuk mulai menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik tidak hanya pada pusat perbelanjaan modern tetapi juga bagi toko-toko kelontong agar penggunaan uang elektronik dapat menjangkau semua kalangan.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat yang belum menggunakan uang elektronik diharapkan mulai menggunakan uang elektronik, karena penggunaannya yang lebih cepat dan mudah. Penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi

pembayaran juga dapat mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) demi terciptanya *cashless society*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad. 2000. **Hukum Perjanjian**. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aulia Pohan. 2011. **Sistem Pembayaran**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Agus Riswandi. 2003. **Hukum dan Internet di Indonesia**. Yogyakarta: UII Press.
- Bank Indonesia. 2017. **Bab 9 Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**. Laporan Perekonomian Indonesia.
- Dadan Mutaqqin. 2008. **Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi**. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. **Hukum Perbankan**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2008. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I Made Pasek Diantha. 2016. **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**. Jakarta: Prenada Media Group.
- Johny Ibrahim. 2007. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- J. Satrio. 2000. **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marsh SB dan Soulsby J. 2006. **Hukum Perjanjian Terjemahan oleh Abdulkadir Muhammad**, Bandung: PT Alumni.
- Muhamad Djumhana. 2006. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2008. **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

- Munir Fuady. 2003. **Hukum Perbankan Modern**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2016. **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. **Penelitian Hukum Edisi Revisi**. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2017. **Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran**. Yurдика Volume 32 Nomor 1.
- Riduan Syahrani. 1992. **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**. Bandung: PT. Alumni.
- R. Serfianto, dkk. 2012. **Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik**. Jakarta: Visi Media.
- Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya. 2003. **Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia**. Jakarta: Studi Pusat Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Zainal Asikin. 2016. **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Jenis-Jenis Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

JURNAL :

Inriasari, Devi Th dan Flourensia Spty Rahayu. 2012. **Analisis dan Perancangan Layanan Perpustakaan UAJY Berbasis Mobile dengan Memanfaatkan QR Code**. <http://e-journal.uajy.ac.id/5556/1/TF76301.pdf>

Nastiti Ninda Lintangari, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, dkk. 2018. **Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia**. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/18772/13125.

S. Sahabuddin. 2017. **Transaksi Konvensional dan Transaksi E-Commerce**, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/download/36/33.

SKRIPSI:

Andi Sulistyo. 2016. **Model Sistem Electronic Voting (E-voting) Berbasis Web dengan menerapkan Quick Response Code (QR Code) sebagai Sistem Keamanan dalam Pemilihan Legislatif**. <http://lib.unnes.ac.id/28056/1/5302411195.pdf>

Jenad. 2013. **Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang negara Indonesia dan Singapura**. <http://repository.uib.ac.id/370/6/S-0851002-chapter%20II.pdf> (diakses pada 13 Februari 2019)

INTERNET:

Agusman. **Siaran Pers Bank Indonesia**. 2017. <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages>

- Aprilia Ika. 2017. **Uang Elektronik vs Dompot Elektronik, Mana yang Lebih Menarik Digunakan?.** <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/09/28/120000326/uang-elektronik-vs-dompot-elektronik-mana-yang-lebih-menarik-digunakan>
- Attorney General's Chambers (SG). **Payment System (Oversight) Act.** <https://sso.agc.gov.sg/Act/PSOA2006#pr7-> (diakses pada 18 Februari 2019)
- Indah Mustikasari. 2017. **Analisis Perkembangan Cashless Society di Indonesia,** <https://iprice.co.id/trend/insights/wawasan-mingguan-tren-cashless-society-di-indonesia/>
- Kiryanto. **Yap! Kini Terintegrasi Dengan e-wallet Dalam dan Luar Negeri.** <http://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/4286/yap-kini-terintegrasi-dengan-e-wallet-dalam-dan-luar-negeri>
- Monetary Authority of Singapore. 2016. **MAS Proposes New Regulatory Framework and Governance Model for Payments.** <http://www.mas.gov.sg/archivesonline/data/pdffdoc/20160825010/Media%20Release%20-%20MAS%20Proposes%20New%20Regulatory%20Framework%20and%20Governance%20Model%20for%20Payments%20in%20Singapore.pdf> (diakses pada 18 Februari 2019)
- Monetary Authority of Singapore. 2017. **Payments Council Endorse Singapore Quick Response Code Specifications for Electronic Payments.** <http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/Payments-Council-endorses-Singapore-Quick-Response-Code-Specifications-for-electronic-payments.aspx> (diakses pada 14 Februari 2019)
- Monetary Authority of Singapore. 2018. **E-payment User Protection Guidelines.** http://www.mas.gov.sg/~media/resource/publications/consult_papers/2018/Epayments%20User%20Protection%20Guidelines.pdf (diakses pada 16 Februari 2019)
- Monetary Authority of Singapore. 2018. **SGQC – Singapore Quick Response Code.** <http://www.mas.gov.sg/sgqr> (diakses pada 16 Februari 2019)
- Nugraha, Pasca M. dan Dr. Ir. Rinaldi Munir M. T. 2011. **Pengembangan Aplikasi QR Code Generator dan QR Code Reader dari Data Berbentuk Image.** <http://informatika.stei.itb.ac.id>
- Standard Chartered Bank. **Gerbang Pembayaran Nasional Aman, Andal, dan Terpercaya.** <https://www.sc.com/global/av/id-impo-info-2002018.pdf>

Supriadi, Cecep. 2017. **Suatu Aplikasi untuk Semua Kebutuhan.**
<https://marketing.co.id/dompel-elektronik-satu-aplikasi-untuk-semua-kebutuhan/>

Website Bank Indonesia. 2011. **Paper Kajian Mengenai E-Money.** Jakarta: Bank Indonesia.

Website Bank BNI. Diakses dari <http://yap.id>

Website Bank Indonesia. 2018. **Perbankan Keuangan Inklusif.** <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program.Contents/default.aspx>





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1763 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.



KESATU : **Dr. Reka Dewantara,SH.MH; Diah Pawestri Maharani, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Yasinta Dinda Asmarani Putri NIM 155010100111122**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Desember 2018



RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kemendiknas Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43019);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Kemendiknas Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/O/2002 tentang Kurikulum Indikatif Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 67 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
Pembimbing :
Pendamping :
SK Dekan :
Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Skripsi :

Yasinta Dinda Asmarani P.
155010100111122
Implikasi Yuridis Penggunaan QR Code
dalam Transaksi Pembayaran dengan
Menggunakan Kanal Pembayaran yang
Terhubung dengan Switching Asing.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	4/12/2018	Konsultasi Bab I - III	Lengkapi footnote, sub judul di bold semua, tambahkan pendekatan komparasi, buat outline Bab IV	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
2.	11/01/2019	Konsultasi Bab I - III dan outline Bab IV	Acc Bab I - III dan outline. Kerjakan sampai Bab V	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
3.	11/01/2019	Konsultasi Bab I - III dan outline Bab IV	Lanjutkan mengerjakan sesuai outline	Diah Pawestri M., S.H., M.H.
4.	1/02/2019	Konsultasi isi Bab IV pembahasan	Lanjutkan sampai Bab V.	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
5.	21/02/2019	Konsultasi Bab IV dan Bab V	Pengumpulan analisis ttd peraturan perundangan ttg QR Code dibuat dalam bentuk tabel, tambahkan implikasi yuridis terkait keabsahan transaksi pembayaran, kemudian terkait keterhubungan switching asing	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
6.	25/03/2019	Konsultasi Bab IV dan Bab V	Memperjelas kesimpulan dan Acc kompre.	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
7.	5/04/2019	Konsultasi Bab I - Bab V	Perbaiki teknik penulisan footnote dan kutipan	Diah Pawestri M., S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Bagian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 311/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : YASINTA DINDA ASMARANI PUTRI
NIM : 155010100111122
Judul : IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN QR CODE DALAM TRANSAKSI
PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL
PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN SWITCHING ASING
(Studi Kasus Tentang Integrasi Your All Payment Bank BNI dengan Liquidpay
Singapore)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 April 2019

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB



Dr. Prta Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

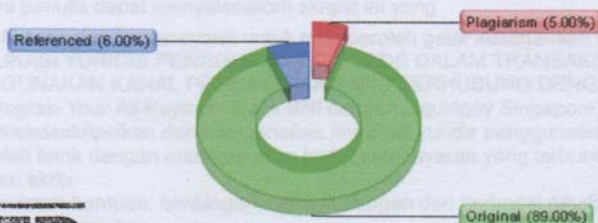
Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 15/04/2019 9:32:11

"155010100111122_YASINTA DINDA_SKRIPSI.docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



CHECKED
PLAGIASI FH UB

Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 9	wrds: 1919	https://docplayer.info/40087642-No-18-41-dksp-jakarta-30-desember-2016-a-u-r-a-f-a-d-a-r-a...
% 5	wrds: 1085	http://repository.ub.ac.id/370/6/S-0851002-chapter%20II.pdf
% 4	wrds: 1004	https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/27448/NTgxMDI=/Telaah-Implikasi-Yuridis-Berlaku...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

146 - Ok / 37 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:

IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN QR CODE DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN SWITCHING ASING(Studi Kasus Tentang Integrasi Your All Payment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore)SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
Disusun Oleh:
Yasinta Dinda Asmarani Putri
155010100111122
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019
HALAMAN PERSETUJUAN
Judul Skripsi
: IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN QR CODE DALAM TRANSAKSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TEHUBUNG DENGAN SWITCHING ASING (Studi Kasus Tentang Integrasi Your All Payment Bank BNI Dengan Liquidpay Singapore)Identitas Penulis
: Nama
: Yasinta Dinda Asmarani PutriNIM
: 155010100111122Konsentrasi
: Hukum Perdata BisnisJangka Waktu Penelitian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaannya.

Malang, Mei 2019
Yang menyatakan,

Yasinta Dinda A. P.
NIM. 155010100111122

